

**Ekonomi
Konvensional
VS
*Ekonomi Syariah***

**Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis,
Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam**

Ekonomi Konvensional VS *Ekonomi Syariah*

**Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis,
Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam**

Agus Waluyo

 **EKUILIBRIA**

EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH; *Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*

oleh Dr. H. Agus Waluyo

Editor: Sukron Ma'mun

Hak Cipta © 2017 pada penulis



Candi Gebang I No. 23 Yogyakarta 55283

Telp: 0274-4432136; E-mail: info@bukuekuilibria.com

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Tajuk Entri Utama: Waluyo, Agus

EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH; *Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam*/Agus Waluyo

- Edisi Pertama. Cet. Ke-1. - Yogyakarta: Ekuilibria, 2017
xiv + 134 hlm.; 25 cm

Bibliografi.: 127 - 134

ISBN : 978-602-61896-4-6

E-ISBN : 978-602-61896-5-3

1. Ilmu Ekonomi - Islam

I. Judul

297.273

Semua informasi tentang buku ini, silahkan scan QR Code di cover belakang buku ini



KATA PENGANTAR

H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si
(Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia)

ARUS BARU EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA

Islam sebagai praktik ekonomi di Indonesia tidak lagi hadir sebagai wacana saja. Namun sekarang mengalami perkembangan yang menggembirakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah salah satu organisasi masyarakat yang sangat gencar mengampanyekan praktik ekonomi yang berlandaskan Islam sebagai norma yang harus dipegang. MUI dalam hal ini memakai istilah ekonomi syariah.

Ekonomi syariah hari ini sudah menjadi salah satu arus baru ekonomi Indonesia disamping sistem ekonomi konvensional. Dengan kata lain, ekonomi syariah menjadi alternatif praktik ekonomi di Indonesia. Perkembangan ini ditandai oleh tiga hal. Pertama, lahirnya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden RI. Kedua, penancangan Jakarta sebagai Pusat Ekonomi dan Keuangan Syariah Dunia. Ketiga, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah.

Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), maka di waktu mendatang akan lebih di dorong pendekatan dari bawah ke atas (*bottom up*). Oleh karena itu,

ke depan ekonomi nasional harus ditopang kuat oleh ekonomi umat, bukan seperti sebelumnya yang hanya ditopang oleh segelintir konglomerat.

Keseriusan pemerintah dalam mendukung ekonomi syariah ditandai dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu sistem perbankan di Indonesia. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan pemerintah dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia.

Sebagai payung hukum pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008. Sebelumnya pada tahun 2002, dalam rangka memberikan pedoman bagi stakeholders perbankan syariah dan meletakkan posisi serta cara pandang Bank Indonesia dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia”.

Berdasarkan data statistik perbankan syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Juli 2017, menyebutkan jumlah sebaran jaringan kantor bank syariah dan unit usaha syariah yaitu Kantor Pusat/Kantor Cabang sebanyak 472, Kantor Cabang Pembantu/Unit Usaha Syariah berjumlah 1.188 buah, dan Kantor Kas ada 189 buah. Sedangkan dari segi jumlah kantor layanan syariah dan unit usaha syariah sejak 2014 juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 berjumlah 1.787, kemudian pada tahun 2015 meningkat jumlahnya menjadi 2.009. Pada 2016 meningkat lagi jumlahnya menjadi 2.567 buah. Selanjutnya data terakhir per Juli 2017 secara keseluruhan sebanyak 2.499 buah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah telah diterima oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif dalam praktik dunia perbankan di Indonesia.

Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil peran sebagai perumus fatwa yang nantinya dapat menjadi stimulan, akselerator, dan integrator dalam mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. MUI sebagai partner pemerintah mengeluarkan fatwa sebagai pedoman mulai dari sisi pembentukan peraturan perundang-undangan, lembaga dan keuangan syariah, prodi di perguruan tinggi, dan pembentukan

kurikulum mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Dan pada saatnya nanti masyarakat madani akhirnya membentuk arus baru ekonomi syariah di Indonesia.

Namun demikian, dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dibutuhkan juga penguatan dari sisi teoritis untuk menguatkan landasan filosofis ekonomi syariah. Saya menyambut dengan sangat gembira buku yang ditulis oleh H. Agus Waluyo, dosen IAIN Salatiga. Buku yang diberi judul “EKONOMI KONVESIONAL VS EKONOMI SYARIAH: Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam” hadir di saat yang sangat tepat ketika perkembangan ekonomi syariah menunjukkan geliat yang terus meningkat.

Dalam bukunya itu, H. Agus Waluyo menunjukkan bagaimana keunggulan sistem ekonomi syariah atau ekonomi Islam dibandingkan dengan sistem ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Kritik terhadap sistem ekonomi kapitalis dinilai oleh H. Agus Waluyo memiliki kelemahan-kelemahan yang sangat mencolok. *Pertama*, Kapitalisme menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan sosial. *Kedua*, Kapitalisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya. *Ketiga*, Kapitalisme telah memunculkan paham materialisme.

Sedangkan sistem ekonomi sosialis juga memiliki kelemahan-kelemahan. Seperti yang diuraikan dalam buku ini. Yaitu *pertama*, ideologi ini mengimplikasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Semua manusia dalam kapasitasnya yang sama sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan dan pegawai pemerintahan, didorong untuk melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan sosial tanpa memperhatikan kepentingan pribadinya. *Kedua*, mesin kekuasaan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Pada dataran praktik ternyata sebaliknya, sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan negara memanfaatkan kekayaan dan pendapatan negara untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, subsidi umum yang besar hanya menguntungkan si kaya dan orang-orang istimewa dibanding si miskin yang daya belinya terbatas.

Lalu H. Agus Waluyo menghadirkan ekonomi Islam sebagai salah satu sistem ekonomi yang dapat menjadi solusi dari kelemahan-kelemahan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dari segi tujuan, secara umum ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan. *Pertama*, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam. Tujuan ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur`an, yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 2, 168; al-Ma`idah (5): 87-88; dan al-Jumu`ah (62): 10. *Kedua*, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid, berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Tujuan ini didasarkan pada ketentuan-ketentuan Allah dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13; al-Maidah (5): 8; dan asy-Syu`ara (26): 183. *Ketiga*, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata yang didasarkan pada Q.S. al-An`am (6): 165; an-Nahl (16): 71; dan az-Zukhruf (43): 32. *Keempat*, menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan individu dan sosial, sebagaimana termaktub dalam Q.S. ar-Ra`du (13): 36; dan Luqman (31): 22.

Buku ini menambah daftar panjang tentang referensi sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Indonesia. Dalam dunia akademis, buku ini bisa menjadi rujukan dalam diskursus ekonomi syariah yang selama ini dikembangkan di Indonesia. Dan ekonomi Islam atau ekonomi syariah adalah bidang keilmuan yang selama ini digeluti oleh penulis. Sehingga buku ini memiliki bobot akademis yang kuat.

Semoga upaya dan jihad keilmuan yang dilakukan oleh penulis dalam menguatkan pondasi diskursus ekonomi Islam di Indonesia dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah SWT. Amin.

Jakarta, 28 September 2017



PENGANTAR

Ba'da basmalah, hamdalah, shalawat dan salam

Buku bertitel “Ekonomi Konvensional Vs Ekonomi Syariah; Kritik terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis, Ekonomi Sosialis, dan Ekonomi Islam” ini penulis sajikan di hadapan pembaca, tentu bukan tanpa alasan. Selain tendensi normatif untuk ikut berperan serta mencerdaskan masyarakat dalam bentuk sumbangan pemikiran, alasan lain yang ingin Penulis kemukakan adalah alasan pragmatis; daripada hasil kajian yang penulis lakukan hanya tergeletak tanpa makna, tidak ada salahnya bila deretan kata dalam naskah itu diterbitkan menjadi sebuah buku. Kedua alasan pada klimaknya bermuara pada pentingnya mengkaji secara kritis sistem ekonomi yang hari-hari ini menjadi “amalan” kita dan “mencicipi” perspektif lain yang lebih bermoral dan dapat dikatakan cukup baru.

Sesuai tajuknya, buku ini akan memulai dengan bercerita mengenai sistem ekonomi yang hingga buku ini masih menjadi perdebatan pada Bab I. Dawali dengan pokok persoalan ekonomi yang menurut literatur adalah bagaimana mengatur dan mengelola kelangkaan sumberdaya di saat kebutuhan yang tak terbatas. Berbagai pemikiran mulai dari hasil olah pikir Adam Smith, yang dianggap sebagai Bapak Ekonomi, perspektif Kritis ala Marxian, hingga perdebatan mengenai perlukah ada sistem yang mengatur ekonomi secara global, menjadi sajian pembuka.

Paparan deskriptif mengenai ekonomi konvensional secara akan menghibur dan memanjakan pembaca pada sajian selanjutnya di Bab II. Cerita tentang Madzhab Kapitalisme akan memulai cerita sistem ekonomi berbasis pada kekuasaan modal itu. alur buku ini berikutnya membawa Pembaca pada kisah aliran sosialisme sebagai pelengkap dan antitesa pemikiran pertama.

Keberhasilan pembangunan di dunia secara global sebandinglurus dan berkelitkelindan dengan sistem ekonomi yang dianut. Dalam pandangan Penulis sistem ekonomi konvensional belum sepenuhnya berhasil dalam pembangunan dan menyejahteraan manusia. Hal itulah yang penulis cobatuturkan, sebagai kritik atas sistem ekonomi konvensional pada Bab III.

Meski tajuk dari buku ini adalah kritik, buku memberikan perspektif sekaligus solusi untuk berbagai persoalan ekonomi di jagat raya ini. Perpektif Ekonomi Islam adalah tawaran yang Penulis pilih sebagai solusi dari kebuntuan sistem ekonomi yang dianut secara global, setelah sebelumnya Sosialisme juga mengalami kegagalan yang menyedihkan dengan runtuhnya Uni Soviet dan belahan negara-negara Eropa Timur sebagai penganutnya. Ekonomi Islam dipandang memiliki keluasan dan keluwesan dalam menyikapi persoalan ekonomi. Pada Bab IV, V dan VI Rancang bangun Hakikat adan Arah Pembangunan Ekonomi Islam, dengan al-Qur'an dan Sunnah, Ijma' dan Qiyas sebagai pelengkapnya dijadikan fondasi, prinsip-prinsip Islam sebagai tiangnya, dan perilaku ekonomi Islam sebagai atapnya, menjadi sajian solutif yang dapat Penulis sajikan.

Singkat cerita, sebelum menutup kata pengantar ini, Penulis tentu saja tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada penerbit Graha Ilmu atas apresiasinya pada ilmu pengetahuan, khususnya pada diskursus Ekonomi Islam dengan menerbitkan buku ini. Semoga menjadi amal ibadah kita bersama dalam *berkhidmah* kepada ilmu pengetahuan.

Kepada pembaca apresiasi Anda dengan menyempatkan untuk membaca buku ini tentu merupakan penghargaan terbesar bagi Penulis. Apa yang kita lakukan bersama semoga menjadi amal jariyah untuk anak cucu kita.

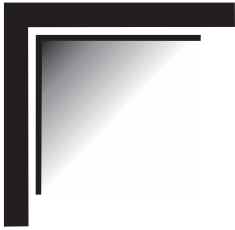
Pada akhirnya Buku ini, tentu saja, tidak bermaksud mempengaruhi pemikiran pembaca yang budiman dan menyetujui pemikiran penulis.

Penilaian berakhir di tangan pembaca yang budiman. Kritik dan saran tentu akan Penulis terima dengan lapangdada dan hati terbuka. Selamat berpiknik di alam idea.

Wallahul muwafiq 'ila 'aqwami al-thariq

Salatiga, 10 November 2017

Dr. H. Agus Waluyo



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
<i>H. Zainut Tauhid Sa'adi, M.Si</i>	v
PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB 1 PROLOG: SISTEM EKONOMI DALAM PERDEBATAN	1
1.1 Persoalan Ekonomi	1
1.2 Ketidaksepahaman Ekonom	2
1.3 Perjalanan dan Perdebatan Sistem Ekonomi	3
BAB 2 SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL	11
2.1 Sistem Ekonomi Kapitalisme	11
2.2 Kelemahan Sosialisme	19
BAB 3 EKONOMI DAN PEMBANGUNAN; SEBUAH KRITIK	31
3.1 Krisis Negara Kesejahteraan	31
3.2 Inkonsistensi Ekonomi Pembangunan	42
3.3 Kritik terhadap Ilmu Ekonomi Konvesional	45
BAB 4 RANCANG BANGUN EKONOMI ISLAM	53
4.1 Paradigma Ekonomi Islam	54
4.2 Prinsip Dasar Ekonomi Islam	58
BAB 5 HAKIKAT EKONOMI ISLAM	71
5.1 Makna Ekonomi Islam	71

5.2	Tujuan Ekonomi Islam	76
5.3	Filosofi Ekonomi Islam	78
BAB 6	ARAH PENGEMBANGAN EKONOMI ISLAM	101
6.1	Pendekatan dan Metodologi Ekonomi Islam	101
6.2	Islamisasi Ilmu Ekonomi	104
6.3	Kontribusi Ibn Khaldun	111
6.4	Bank Islam sebagai Bentuk Islamisasi dalam Praktik	114
BAB 7	EPILOG: KRITIK EKONOMI KONVENSIONAL DAN PROSPEK EKONOMI ISLAM	123
7.1	Kritik Terhadap Kapitalisme	123
7.2	Kritik Terhadap Sosialisme	124
7.3	Prospek Ekonomi Islam	125
	DAFTAR PUSTAKA	127



PROLOG: SISTEM EKONOMI DALAM PERDEBATAN

Tanpa disadari, sejarah dunia telah berumur sangat lama, tak terkecuali perjalanan pembangunan ekonomi dunia. Bahkan dalam lintasan yang panjang, sejarah pembangunan dunia telah berumur 5000 tahun¹. Perjalanan yang panjang tentunya mencatat lembaran demi lembaran catatan sejarah tentang pasang surut pembangunan ekonomi dunia. Berbagai aliran pemikiran (*school of thought*) muncul dengan latar belakang dan dialektika masing-masing yang tentunya bermuara pada pembangunan ekonomi. Banyaknya aliran tersebut menghasilkan perbedaan yang tidak dapat dihindarkan, walaupun menyoroti persoalan yang sama. Perdebatan sistem ekonomi dalam rangka pembangunan ekonomi dunia seperti tidak akan pernah usai karena banyaknya aliran ekonomi dan semakin kompleks perubahan dunia.

1.1 PERSOALAN EKONOMI

Sebelum masuk perdebatan tentang sistem ekonomi, perlu mendiskusikan persoalan ekonomi yang kemudian membentuk ilmu ekonomi itu sendiri. Pembahasan tentang seluk beluk ilmu ekonomi menjadi penting karena kita akan mengetahui permasalahan inti ekonomi dan hal-hal yang mendasari kenapa ilmu ekonomi terus berkembang.

Ilmu Ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana masyarakat mengelola sumberdaya yang langka². Berdasarkan definisi tersebut, titik persoalan ekonomi adalah kelangkaan (*scarcity*) yang

berarti masyarakat memiliki sumberdaya terbatas, sehingga mereka tidak dapat memproduksi semua barang yang diinginkan. Kelangkaan ini kemudian bertolak belakang dengan naluri manusia untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkannya. *Gap* tersebut kemudian menjadi ruang eksistensi ilmu ekonomi untuk membantu masyarakat untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhannya dengan sumberdaya yang terbatas.

Meskipun ilmu ekonomi memiliki banyak perbedaan definisi, perbedaan tersebut kemudian dipersatukan oleh beberapa pemikiran mendasar yaitu sepuluh prinsip ekonomi. Sepuluh prinsip ekonomi ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu pertama, Bagaimana masyarakat mengambil keputusan yang terdiri dari orang menghadapi tradeoff, biaya adalah apa yang anda korbankan untuk mendapatkan sesuatu, orang rasional berfikir pada batas-batas, dan orang tanggap terhadap insentif. kedua, Bagaimana masyarakat berinteraksi, terdiri dari perdagangan menguntungkan semua pihak, pasar adalah tempat yang baik untuk mengorganisasikan kegiatan ekonomi, dan pemerintah terkadang mampu meningkatkan hasil-hasil dari pasar. Ketiga, Bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja, terdiri dari: Standar hidup suatu Negara bergantung pada kemampuannya menghasilkan barang dan jasa, harga-harga meningkat jika pemerintah mencetak uang terlalu banyak, dan masyarakat menghadapi tradeoff jangka pendek antara inflasi dan pengangguran.

Persoalan dasar yang menjadi perhatian ekonom untuk membuat langkah yang efektif dan efisien dalam rangka menjawab permasalahan kelangkaan dan keterbatasan adalah 1) Apa yang harus diproduksi (*What*)? tentang kuantitas dan kualitas produk. 2) Bagaimana cara memproduksi (*How*)? tentang input dan teknik yang digunakan. 3) Untuk siapa hasil produksi itu (*For Whom*)? mengenai distribusi dan siapa yang menikmati produk tersebut.

1.2 KETIDAKSEPAHAMAN EKONOM

Para ekonom mencoba menjelaskan subjek mereka dengan objektivitas seorang ilmuwan. Seperti semua ilmuwan, mereka membuat asumsi-asumsi yang tepat dan membangun model-model yang disederhanakan dalam rangka memahami dunia sekeliling mereka³. Hasil Kajian antar ekonom dalam menyelesaikan persoalan sering terjadi perbedaan. Perbedaan

tersebut disebabkan ekonom memiliki 2 (dua) peranan yaitu ekonom bertindak sebagai ilmuwan dan bertindak sebagai penasehat kebijakan.

Peran ganda ekonom dapat dijelaskan melalui dua jenis pernyataan yaitu pernyataan positif (*positive statement*) bersifat deskriptif. Pernyataan positif berbicara mengenai bagaimana dunia yang sebenarnya. Jenis yang kedua, seperti pernyataan norma, bersifat normatif. Pernyataan normatif (*normative statements*) bersifat memberikan petunjuk. Pernyataan normative berbicara mengenai bagaimana dunia yang seharusnya⁴. Ketika para ekonom membuat pernyataan normatif, mereka bertindak sebagai penasihat kebijakan. Sebaliknya ketika membuat pernyataan positif, ekonom bertindak sebagai ilmuwan.

1.3 PERJALANAN DAN PERDEBATAN SISTEM EKONOMI

Jika ditelusuri ke belakang, pemikiran ekonomi sudah ada bersamaan dengan adanya manusia itu sendiri. Dalam kurun waktu selama itu tentunya banyak sekali fakta-fakta sejarah pembangunan sistem ekonomi⁵ sebagai pijakan pembangunan ekonomi yang lebih baik di masa mendatang. Akan tetapi mengumpulkan dokumen bukti-bukti yang mengisahkan pemikiran ekonomi sangat sulit, walaupun ada dokumen tersebut sulit untuk diverifikasi kebenarannya karena tradisi penulisan/publikasi belum intensif dilakukan.

Pemikiran paling awal yang bisa dijejaki adalah pemikiran ekonomi pada masa Yunani Kuno. Pemikiran-pemikiran ekonomi Yunani kuno sering dikaitkan dengan etika moral, begitu juga dengan aliran skolastik yang menghubungkan nilai-nilai ekonomi dengan ajaran gereja. Dua aliran ini belum memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian modern. Sedangkan satu pemikiran di era pra klasik yang cukup memberikan kontribusi pemikiran secara signifikan adalah pemikiran ekonomi masa merkantilisme. Pada masa ini, berhasil mengembangkan teknik-teknik abstrak untuk menemukan hukum-hukum ekonomi. Pencipta model ekonomi paling dini adalah Francis Quesnay lewat *Tableau Economique*-nya.

Dalam bukunya yang tulis tahun 1758 tersebut, *Quesnay* menggambarkan sistem perekonomian suatu negara seperti layaknya kehidupan biologis manusia. Antara bagian satu dengan bagian lainnya membentuk suatu kesatuan yang harmonis. Begitu juga proses dan gejala kehidupan ekonomi

jika dilihat hubungan antar bagian saling membentuk suatu keseluruhan dengan hokum-hukum tersendiri. Pola dan garis pemikiran Quesnay sudah tersusun dalam suatu kerangka dasar analisis tertentu mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa, dan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Pemikiran-pemikiran ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-XV, saat terjadi revolusi pertanian di Eropa. Akan tetapi, pengakuan terhadap ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-XVIII, setelah Adam Smith (1729-1790) menulis buku yang sangat fenomenal: *An inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations*, atau sering disingkat *Wealth of Nations*. Buku yang tulis pada tahun 1776 tersebut mentahbiskan Smith sebagai “Bapak Ilmu Ekonomi” karena dianggap sebagai pancangan pertama tonggak sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Selanjutnya, Smith ini pemikir yang merepresentasikan mazhab klasik⁶

Smith berpendapat bahwa perekonomian akan berkembang jauh lebih baik jika dibiarkan sendiri dan tidak usah diatur-atur atau direncanakan, sesuai faham *laissez-faire*, *laissez passer*. Pandangan Smith tersebut tidak disetujui oleh pemikir-pemikir sosialis, terutama oleh karl Marx. Pemikir Sosialis lebih menginginkan agar perekonomian serba direncanakan, diatur, dan diawasi secara ketat oleh pemerintah. Sistem yang ditawarkan adalah sosialisme. Dalam sistem sosialis tidak ada perbedaan yang mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Hal itu karena alat-alat produksi merupakan milik negara. Maka, dalam sistem sosialis dengan sendirinya tidak ada orang yang menganggur⁷.

Pemikiran sosialis yang meramal kejatuhan sistem kapitalis yang bertitik pada teori nilai kerja dan tingkat upah kemudian ditentang oleh aliran pemikiran yang tergabung dalam mazhab neo-klasik. Tokoh-tokoh yang tergabung dalam kelompok ini adalah W. Stanley Jevons (1853-1882), Leon Walras (1837-1910), Carl Menger (1840-1921) dan Alfred Marshal (1842-1924). Keempat ekonom tersebut menghasilkan kesimpulan yang sama yaitu teori nilai lebih (*surplus value*) Marx tidak mampu menjelaskan secara tepat tentang nilai komoditas. Kesimpulan tersebut meruntuhkan bangunan teori yang dibangun Marx sekaligus menyelamatkan sistem liberal/kapitalis dari kemungkinan krisis sebagaimana diramal Marx.

Keberhasilan aliran Neo-Klasik mementahkan serangan pemikir sosialis/Marxis, tidak serta merta menyebabkan sistem liberal/kapitalisme dianut oleh semua negara. Di Jerman berkembang satu aliran yang menamakan diri sebagai Aliran Sejarah (Historism)⁸. Pola aliran ini didasarkan pada perspektif sejarah. Tokoh-tokoh aliran ini adalah Friedrich List (1789-1846), Bruno Hildebrand (1812-1878), Gustav von Schmoller (1839-1917), Werner Sombart (1863-1941), Max Weber (1864-1920) dan Henry Charles Carey (1793-1879). Pemikiran Aliran Sejarah mengkritik pandangan kaum klasik tentang perekonomian sebaiknya diserahkan pada kekuatan pasar. pemikiran seperti ini dinilai terlalu mekanistik. Mereka menghendaki agar hal ini diganti dengan dasar pemikir etis. Motif ekonomi seseorang tidak hanya didasarkan oleh kepentingan individu tetapi juga didasarkan etika dan impuls-impuls yang lain.

Jika dicermati doktrin aliran sejarah kurang jelas, mereka terkesan tidak mengembangkan sistem. Akan tetapi hanya merupakan reaksi dari pandangan klasik dan neo-klasik yang menghendaki tidak adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Pemikir aliran sejarah hanya mengkritik metode deduktif klasik tanpa melihat metode induktif-empiris mereka sendiri. Keuntungan dari pemikiran aliran sejarah dikemudian hari adalah kesadaran penelitian bagi ekonom untuk menggunakan metode deduksi (*reasoning from the general to the particular*) dan induksi (*reasoning from the particular to the general*) secara hilir mudik yang kemudian disebut *metode reflective thinking*.

Sementara aliran sejarah dikembangkan di Jerman, di daratan Amerika Serikat pada abad 20-an muncul aliran pemikiran ekonomi yaitu aliran institusional. Ada sedikit persamaan antara aliran institusional dengan aliran sejarah, sebab keduanya sama-sama menolak metode klasik. Akan tetapi, dasar falsafah dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran ini berbeda. Aliran institusional menolak eksperimentasi sebagaimana yang dianut aliran sejarah. Begitu juga, pusat aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga berbeda⁹. Tokoh Aliran Institusional diantaranya Thorstein Bunde Veblen (1857-1929), Wesley Clair Mitchel (1874-1948), Gunnar Karl Myrdal (1898-19..), Joseph A. Schumpeter (1883-1950).

Beberapa pemikiran aliran institusional yaitu tidak semua gejala dan perilaku ekonomi dianalisis dengan kerangka ekonomi saja, tetapi memerlukan keahlian dibidang lain seperti sosiologi, politik dan hukum. Veblen juga menghawatirkan penyakit conspicuous consumption dan semakin banyaknya leisure class dan pengusaha predator. Jika kondisi perilaku konsumsi dan produksi tidak dirubah maka akan menyebabkan pemborosan tenaga, energi dan sumber daya yang berakibat pada kemerosotan perekonomian negara.

Berkat jasa tokoh-tokoh neo-klasik mematahkan serangan sosialis/marxis terhadap liberal/kapitalis, perekonomian abad ke-20 praktis berjalan mengikuti faham *laissez faire-laissez passer* seperti yang didambakan para pemikir neo-klasik. Ditunjang oleh pemikiran JB Say yang mengasumsikan bahwa penawaran akan selalu berhasil menciptakan permintaan sendiri (*supply creates it's own demand*). Teori ini menyebabkan perusahaan berlomba-lomba menghasilkan barang-barang sebanyak-banyaknya. Akibatnya, produksi meningkat dan tidak terkendali, hingga pada tahun 1930-an dunia mengalami depresi besar-besaran (*great depression*). Perekonomian hancur, pengangguran terbuka merajalela, dan inflasi naik tidak terkendali. Pada posisi ini teori-teori klasik maupun neo-klasik tidak ada yang mampu menjelaskan dan mengatasinya, sampai muncullah John Maynard Keynes (1883-1946) yang terkenal dengan bukunya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* atau familiar dengan sebutan *The General Theory*.

J.M. Keynes mengkritik dan mencoba memperbaiki asumsi Say bahwa permintaan pada umumnya lebih kecil dari pendapatan. Dengan demikian perekonomian sering dalam posisi tidak seimbang. Walaupun seimbang, terjadi pada tingkat output rendah dan sumber-sumber daya tidak dimanfaatkan sepenuhnya. Karena perekonomian tidak selalu dalam posisi keseimbangan pemanfaatan sumber daya penuh maka campur tangan pemerintah diperlukan dalam rangka mengarahkan perekonomian pada keadaan yang diinginkan. Pandangan Keynes tersebut menciptakan revolusi dalam pemikiran ekonomi. Perekonomian yang semula hanya dilihat dari sisi mikro, orang mulai melakukan pendekatan makro. Selama kurun waktu empat dekade sejak tahun 30-an sampai 70-an pandangan Keynes mendapat tempat di banyak negara terutama negara berkembang yang ingin memacu pertumbuhan ekonominya. Pada fase ini, pemikiran Keynes mendominasi

profesi ekonomi dan kebijakan publik yang berarti dominasi klasik kembali diturunkan.

Pemikiran Keynes ini kemudian dikembangkan dan diperbarui pendukungnya baik dari golongan Neo-Keynesian maupun Pasca Keynesian maupun Post Keynesian. Tokoh-tokoh Keynesian ini diantaranya adalah Alvin Harvey Hansen (1887-1975), Simon Kuznets (1901-1985), John R. Hicks (1904-....), Wassily Leontief (1906-....), Paul Samuelson (1915-....). Keynesian berhasil mengembangkan teori-teori yang berhubungan dengan usaha menjaga stabilitas perekonomian. Teori-teori tersebut menerangkan dan mengantisipasi fluktuasi ekonomi (*business cycle*) dan teori-teori yang berhubungan dengan pertumbuhan dan pendapatan. Sebagai catatan, bahwa pemikiran-pemikiran ekonomi pasca-keynesian lebih berupa kumpulan ide-ide tetapi tidak diformulasikan secara sistematis. Dampak kehadiran mereka memang ada, terutama dalam penelitian-penelitian ekonomi. Akan tetapi, pengabaian atau bahkan penolakan mereka tentang rasionalitas dan perilaku maksimisasi pada pelaku-pelaku ekonomi telah membuat mereka agak aneh dengan profesi aliran utama (*mainstream*) yang mencoba mendekatkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro dengan ekonomi mikro¹⁰.

Pada periode tahun 70-an perekonomian berkali-kali mengalami resesi, terjadi pengangguran tinggi dan inflasi tinggi. Teori yang ditawarkan Keynes tidak mampu memperbaiki perekonomian. Pada tahun-tahun tersebut muncul pemikiran baru untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi yaitu aliran monetaris yang tokoh utamanya adalah Milton Friedman yang menulis *A Theoretical Framework for Monetary Analysis* (1970) yang menekankan pandangannya pada stok uang. Perubahan dalam stok uang beredar sangat berpengaruh terhadap 1) tingkat inflasi dalam jangka panjang 2) perilaku GNP Riil jangka panjang. Perilaku dalam laju pertumbuhan jumlah uang beredar sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi riil. Sehingga ketidakstabilan pertumbuhan moneter akan berakibat pada aktivitas ekonomi. Jika dibandingkan dengan Keynes yang menyelesaikan persoalan ekonomi dengan pendekatan fiskal sedangkan pandangan Friedman dengan pendekatan moneter.

Beberapa saran dari pandangan monetaris sedikit banyak mirip aliran sisi penawaran, titik temu dari pemikiran ini adalah sama-sama menganjurkan kebijaksanaan pemerintah yang lebih kontraktif. Pandangan

ini juga didukung oleh aliran *Rational Expectation* (Ratex) yang dimiliki tokoh diantaranya Robert Lucas, Thomas Sargeant, Neil Wallace, Robert Barro, Leonard Rapping, Edward Prescott, David Begg, Steven Sheffrin dan John Muth. Jasa dari pemikiran Ratex ini diantaranya telah menemukan kerangka teoritis yang fundamental dengan sebutan pendekatan keseimbangan ekspektasi (*rational expectations equilibrium approach*) dalam teori makro. Kelemaha dari aliran ini adalah masih sedikitnya bukti-bukti empiris yang tersedia.

Melihat perkembangan pemikiran ekonomi diatas, pakar-pakar ekonomi ada yang percaya bahwa kedepan akan terjadi penggabungan ilmu ekonomi secara utuh antara ekonomi mikro dan makro. Bahkan, mungkin kedepan akan memunculkan alternatif aliran-aliran ekonomi yang sebelumnya belum mendapatkan ruang semisal aliran ekonomi Islam. Ekonomi Islam bisa menawarkan sebuah sistem yang dapat mmbangun pereonomian lebih beradab karena menawarkan sisi moral yang selama ini cenderung terabaikan dalam analisa ekonomi dan seringkali menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi. Ada perbedaan mendasar dalam ekonomi Islam dan ekonomi lainnya, yaitu ekonomi Islam memadukan antara ilmu dan etika, atau juga seperti tidak memisahkan antara ilmu-ilmu yang lain dengan etika seperti ilmu politik, teknik, antropologi, militer, kedokteran dan lainnya. Islam merupakan risalah yang diturunkan Allah malalui rasul untuk membenahi akhlak manusia. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa "*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*"¹¹.

Selain persoalan moralitas, titik tekan ekonomi Islam adalah persoalan fungsi uang yang hanya bermotif transaksi (*transaction motives*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motives*) tanpa adanya motif spekulasi (*speculative motives*) seperti yang disampaikan Keynes. Al-Ghazali dalam Ihya Ulu-muddin menerangkan bahwa Islam melarang memperdagangkan uang, memperdagangkan uang sama artinya memenjarakan uang sehingga fungsi untuk bertransaksi tidak berjalan dengan baik. Kondisi ini menyebabkan sektor moneter tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi riil sehingga perekonomian secara keseluruhan mudah diguncang. Ketika saham hanya ditentukan permintaan dan penawaran saham dengan mengabaikan kinerja secara riil maka akan menyimpan potensi bahaya terhadap perekonomian,

karena dalam perekonomian seringkali terjadi rekayasa-rekayasa harga saham, salah satunya adalah *insider trading*.

Krisis ekonomi dan keuangan global yang terjadi berulang-ulang di negara-negara kapitaisme mungkin menjadi petunjuk masyarakat Indonesia, bahkan dunia, untuk meninggalkan neo-liberal. Adapun pilihan yang masuk akal dan cerdas menurut pakar ekonomi Islam adalah meninggalkan sistem yang bobrok tersebut dan bergerak ke arah ekonomi syariah yang lebih adil. Hal ini tidak diserukan orang-orang Islam, tetapi orang non muslim. Contohnya, Murad Wilfried Hofman, mantan diplomat Jerman, menyatakan "*Islamic alternative*". Sistem ini akan memanusiaikan kembali manusia, mengatur dunia ini sesuai dengan fitrah penciptaan manusia serta membawa manusia pada kemuliaan.¹²

-
- 1 Ahmad Erani Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 2.
 - 2 N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 4.
 - 3 N. Gregory Mankiw, *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hlm. 41.
 - 4 *Ibid*, hlm. 35.
 - 5 Sistem ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas, namun ia tidak bisa lepas dari terminology sistem itu sendiri. Secara umum sistem ekonomi merupakan entitas yang tersusun dari elemen-elemen yang saling berinteraksi sehingga batas tertentu membentuk sebuah jaringan kerja yang konsistendalam kehidupan ekonomi. Selengkapnya baca Munawar Ismail, dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014) hal. 16.
 - 6 Secara mendalam aliran klasik dapat dipelajari dalam bukunya Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan: Edisi 5*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 70-90.
 - 7 Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) hlm. 244.
 - 8 Aliran ini dapat dipelajari dalam bukunya Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 5, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 56-70.
 - 9 Deliarnov, *Perkembangan....*, hlm. 141.
 - 10 *Ibid*, hlm. 191.
 - 11 Irham Fahmi, *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013) hlm. 85.
 - 12 Deliarnov, *Perkembangan....*, hlm. 279.



SISTEM EKONOMI KONVENSIONAL

Sistem ekonomi¹ merupakan sebuah konsep fundamental sekaligus mekanisme melakukan aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi dapat memengaruhi keinginan dan aspirasi suatu masyarakat, sehingga akan menentukan kepribadian ideal seseorang.² Di samping itu sistem ekonomi juga dapat menentukan arah kebijakan ekonomi bagi sebuah negara tertentu. Suatu negara akan menganut sistem ekonomi yang sesuai dengan arah kebijakannya.

Nampaknya sistem ekonomi juga memperlihatkan pola pikir, budaya, dan peradaban yang berkembang dalam sebuah masyarakat. Sistem ekonomi konvensional, untuk membandingkan dengan sistem ekonomi Islam, merupakan produk pemikiran, budaya dan peradaban sebuah masyarakat. Bagian ini dimaksudkan untuk melihat sistem ekonomi konvensional yakni sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Catatan masing-masing sistem ekonomi juga akan disajikan untuk melihat titik kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem.

2.1 SISTEM EKONOMI KAPITALISME

Harus diakui bahwa hingga saat ini beberapa negara masih menganut dan mengagungkan sistem ekonomi konvensional di bawah dominasi Kapitalisme. Hingga saat ini Kapitalisme telah mengalami modifikasi terus menerus selama beberapa abad. Kapitalisme dalam bentuk *laissez-faire* memang telah tumbang dan berubah, namun demikian bentuk

modifikasinya masih tetap berkembang dan memiliki pengaruh. Bahkan secara konvergen dan virtual, hampir seluruh negara mengadopsi sistem ekonomi yang *market-oriented* tersebut dan terintegrasi menuju ekonomi Kapitalisme global.

Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang secara jelas ditandai oleh berkuasanya 'kapital'. Kapitalisme mulai tumbuh dan berkembang di Inggris pada abad ke-18, kemudian menyebar ke Eropa Barat dan Amerika Utara sebagai akibat dari perlawanan terhadap ajaran gereja yang pada akhirnya merambah segala bidang, termasuk ekonomi. Pandangan dunia (*worldview*) Kapitalisme sangat dipengaruhi oleh gerakan 'Pencerahan' (*enlightenment*)³ yang berlangsung selama kurang lebih dua abad, yaitu sejak permulaan abad 17 sampai permulaan abad 19. Abad pencerahan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan 'abad rasio'. Dalam bentuknya yang ekstrem berarti suatu penolakan atau antitesis terhadap kepercayaan Kristen karena terjadinya korupsi dan despotisme.

Ciri utama dari sistem Kapitalisme adalah tidak adanya perencanaan ekonomi sentral. Harga pasar yang dijadikan dasar keputusan dan perhitungan unit yang diproduksi, pada umumnya tidak ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi yang bersaing. Semua ini adalah hasil dari kekuatan pasar. Dengan tidak adanya perencanaan terpusat maka telah memberi kebebasan dan kekuasaan mutlak kepada pemilik modal untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Bahkan Kapitalisme banyak memberi peluang lebar kepada konglomerat dengan dukungan biaya besar untuk mengalihkan sumber daya nasional untuk diproduksi dan mengimpor barang-barang mewah yang bukan kebutuhan dasar masyarakat.

Bagi Kapitalisme, solusi terbaik untuk menyelesaikan kemiskinan masyarakat adalah dengan meningkatkan produksi. Dalam menyelesaikan kemiskinan suatu negara, Kapitalisme berusaha meningkatkan produksi dalam negeri dan memberikan kebebasan bagi penduduk untuk mengambil hasil produksi sebanyak-banyaknya. Dalam sistem kapitalis setiap individu masyarakat diberi kebebasan untuk memiliki dan berusaha secara bebas sehingga dapat memperoleh kekayaan sesuai dengan faktor produksi yang dimiliki. Dengan cara ini Kapitalisme berasumsi bahwa dalam sistemnya terdapat distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata dan *fair*.⁴

Dasar-dasar filosofis pemikiran ekonomi kapitalis sebagai tersebut di atas sesungguhnya bersumber dari tulisan Adam Smith pada tahun 1776.⁵ Isi buku tersebut pada dasarnya sarat dengan pemikiran-pemikiran tingkah laku ekonomi masyarakat. Melalui buku ini, Adam Smith yang dianggap sebagai Bapak ekonomi kapitalis, mengupas banyak hal tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi kapitalis.⁶ Dari dasar filosofi tersebut kemudian menjadi sistem ekonomi dan pada akhirnya mengakar menjadi ideologi yang mencerminkan gaya hidup. Motif kepentingan individu kapitalistik yang didorong oleh filsafat liberalisme ini melahirkan sistem ekonomi pasar bebas. Dengan sistem pasar bebas telah mendorong Kapitalisme berkembang berdasarkan kepentingan-kepentingan pribadi pelaku ekonomi. Menurut Smith, Kapitalisme muncul dan berkembang secara dominan akibat proses respon kolektif masyarakat terhadap perilaku individual, bukan hasil dari proses sistematis yang terencana.

Dalam bukunya, Smith mengidentifikasi bahwa sentimen, perasaan dan nafsu adalah motivator utama manusia dalam bertindak. Smith berkeyakinan bahwa Bible bukan merupakan sumber yang terjamin kebenarannya. Secara implisit Smith⁷ mengesampingkan peran agama dalam perekonomian, padahal memiliki konsep dan hukum yang sistematis mengenai persoalan ekonomi.

Asumsi yang selama ini dijadikan acuan dalam pengembangan ekonomi konvensional adalah paradigma yang bersumber dari mitos Kapitalisme Smithian. Asumsi-asumsinya meliputi:⁸ (1) kebutuhan manusia yang tidak terbatas; (2) sumber-sumber ekonomi relatif terbatas berupa maksimalisasi kepuasan pribadi; (3) kompetisi sempurna; dan (4) informasi sempurna. Pandangan ini terlihat kontradiksi dengan realitas, karena menunjukkan informasi tidak sempurna dan kompetisi tidak sempurna sehingga tidak pernah terwujud.

Di samping itu, asumsi dasar dari Smithian yang terlalu sederhana menyatakan bahwa manusia rasional adalah manusia yang berdasar inisiatifnya sendiri mengejar utilitas ekonomi optimal, yaitu mencari keuntungan maksimal dengan pengorbanan yang minimal. Ia bersaing di pasar bebas dan menjadi pelaku yang bebas dengan berpedoman pada *laissez-faire* yang meneguhkan doktrin *individual freedom of action*. Manusia

rasional semacam ini disebut sebagai *homo economicus* yang berlawanan dengan *homo ethicus*.⁹

Hingga saat ini ekonomi konvensional yang bersumber dari gagasan Smith memperoleh wibawa intelektual yang sangat besar. Bahkan tidak dipungkiri bahwa Kapitalisme telah memberikan begitu banyak hasil positif bagi peradaban umat manusia. Kemudahan fasilitas hidup, perkembangan teknologi, variasi produk, dan infrastruktur menjadi bukti bahwa Kapitalisme menunjukkan perannya yang signifikan dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan Pembangunan ekonomi di negara-negara penganut faham kapitalis, khususnya negara Eropa Barat dan Amerika dianggap telah memberi bukti nyata dalam aspek kesejahteraan masyarakatnya.

Terlepas dari itu semua, di balik kesuksesan Kapitalisme memberikan kemajuan ekonomi bagi manusia, ternyata ada kerancauan atau bahkan kontradiktif. Selama abad 20, terdapat data-data yang jelas menunjukkan bahwa sistem Kapitalisme memberikan guncangan ekonomi dan implikasi-implikasi negatif. Bahkan tidak dapat dipungkiri, konsep kesejahteraannya tidak serta merta dapat dipraktikkan di negara-negara berkembang, sehingga indikator pemerataan ekonomi global tidak tampak terlihat sampai sekarang. Kondisi ini menjadi semakin parah, ketika negara-negara kapitalis tersebut menggunakan kekuasaan ekonomi untuk mempengaruhi prikehidupan internasional dalam segala aspek seperti politik dan budaya. Kapitalis pada saat sekarang telah menjadi imperialis bagi negara-negara berkembang.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya jeratan hutang di hampir seluruh negara berkembang, kemiskinan yang semakin meluas di negara dunia ketiga, dan krisis-krisis ekonomi khususnya sektor keuangan telah menyerang perekonomian dunia. Keterpurukan ekonomi yang melanda dunia tersebut merupakan imbas dari sistem Kapitalisme yang semata-mata berorientasi pada akumulasi kapital dan mengabaikan faktor-faktor penting dalam kehidupan, baik nilai-nilai moral maupun aspek kehati-hatian yang populis dengan manajemen resiko dalam diskursus ilmu ekonomi. Transaksi derivatif yang menjadi awal krisis adalah fakta kongkrit yang tidak terbantahkan bahwa memperoleh keuntungan dengan jalan spekulasi semata akan dapat mendatangkan kerugian bagi pelakunya. Hal

yang demikian menunjukkan bahwa sistem ekonomi tersebut gagal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat manusia.

Sistem kapitalis yang mengakui kepemilikan individu dengan pemikiran positivisme pada kelompok ini telah melepaskan pemikirannya dari kerangka nilai atau norma-norma sehingga menimbulkan ketidakadilan distribusi pendapatan dan kecemburuan sosial. Perilaku ekonomi yang tidak mempertimbangkan moral pada akhirnya melahirkan tindakan monopoli (*ihlikar*), penimbunan (*iktinaz*), dan penarikan bunga. Kepentingan rakyat selalu dikorbankan sehingga terjadi ketimpangan (*ketidakadilan*) pendistribusian pendapatan dan kekayaan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya ketidakadilan distribusi pendapatan.¹⁰ Asas distribusi yang diterapkan pada akhirnya berdampak pada realitas bahwa yang menjadi penguasa sebenarnya adalah pemilik modal dan konglomerat.

Kapitalisme telah digugat oleh banyak kalangan karena tidak mampu menjawab berbagai permasalahan ekonomi nasional maupun global. Bahkan Kapitalisme dianggap sebagai sumber masalah kerusakan lingkungan, kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran, dan pelanggaran HAM serta degradasi moral. Bagi negara-negara berkembang, Kapitalisme bukan saja telah gagal mengatasi krisis pembangunan, namun lebih memperburuk kondisi sosial-ekonomi di dunia ketiga. Dengan kata lain, Kapitalisme gagal meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang, bahkan telah melakukan penguasaan terhadap kekayaan mereka.

Di beberapa negara kapitalis sebenarnya telah berkembang suatu pandangan skeptis terhadap sistem yang telah dianutnya, terutama mengenai kecukupan dalam bidang distribusi dari mekanisme pasar dan persaingan bebas. Kekurangmampuan pasar bebas untuk mewujudkan tercapainya keadilan tertentu yang diharapkan dalam pemanfaatan sumber daya juga semakin diakui oleh para pendukung sistem Kapitalisme. Demikian pula program persaingan sempurna ternyata juga belum pernah tercapai hingga saat ini. Bahkan pada saat yang sama pasar monopoli dan oligopoli berperan besar dalam menciptakan ketidakadilan pendapatan dan kekayaan.¹¹

Kapitalisme memiliki kelemahan-kelemahan yang sangat mencolok. *Pertama*, Kapitalisme menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan

sosial, sebagaimana pendapat Smith yang menyatakan bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh individu pada hakikatnya adalah melayani kepentingan sosial. *Kedua*, Kapitalisme mengesampingkan peran nilai moral sebagai alat filterisasi dalam alokasi dan distribusi sumber daya. *Ketiga*, Kapitalisme telah memunculkan paham materialisme.¹²

Kapitalisme memiliki lima ciri utama¹³ yang semakin mempertegas kelemahan-kelemahannya. *Pertama*, Kapitalisme menganggap pentingnya ekspansi kekayaan dan maksimalisasi produksi serta pemenuhan keinginan (*want*) individu bagi kesejahteraan manusia.¹⁴ Untuk menciptakan kesejahteraan hanya didasarkan pada kombinasi antara harga dan peran negara dengan indikator pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi serta pemerataan yang lebih besar, bukan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kedua, Kapitalisme menganggap penting adanya kebebasan individu dalam aktualisasi kepentingan dan kepemilikan kekayaan. Memiliki dan mengatur menjadi keharusan bagi insiatif individu. *Ketiga*, mengasumsikan bahwa inisiasi individu dalam pembuatan keputusan yang terdenstralisasi dalam pasar kompetitif sebagai syarat utama dalam mewujudkan efisiensi optimum dalam alokasi sumber daya. *Keempat*, Kapitalisme tidak mengakui pentingnya pemerintah dan nilai-nilai kolektif dalam efisiensi alokatif maupun pemeratan distributif. *Kelima* mengklaim bahwa melayani kepentingan diri sendiri oleh setiap individu secara otomatis akan melayani kepentingan sosial kolektif.¹⁵

Berdasarkan pada lima ciri tersebut maka Kapitalisme sebagai sistem yang mengakui logika sistem pasar telah berdampak pada terjadinya simetri antara kepentingan individu dan sosial. Diasumsikan bahwa individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berdaulat penuh dapat bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang dan jasa dengan harga rendah. Sebagai produsen individu juga bertindak secara rasional dan merespons secara pasif terhadap permintaan dengan melakukan produksi yang dibayai dengan ongkos yang serendah-rendahnya sehingga dapat meningkatkan keuntungan. Adanya simetri tersebut maka Kapitalisme dapat dianggap gagal menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat.

Di samping itu Kapitalisme yang mengagungkan sistem pasar pada akhirnya dapat menimbulkan dua hal, yaitu *greedy* dan *delusion* (keserakahan dan angan-angan). Sistem ekonomi pasar dan nilai-nilai yang dianut Kapitalisme akan terus menggusur nilai-nilai dan pandangan fundamental yang selama ini dipengangi masyarakat. Sistem yang semula dibangun dengan landasan religius digantikan dengan mekanisme pasar yang diyakini berfungsi sebagai 'mekanisme otomatis' dengan hukum-hukum *invisible hand*-nya. Konsep kebahagiaan dan keselamatan agama digantikan dengan kebahagiaan materiil semata.

Hal yang demikian merupakan bentuk pelarian dari filosofi dasar mayoritas agama. Agama-agama pada umumnya berpendapat bahwa meskipun kemakmuran materiil dianggap penting, tetapi tidak cukup dapat menggerakkan kepentingan diri sendiri dan menjamin kepentingan sosial atau mencegah timbulnya bentuk-bentuk tindakan yang merugikan. Agama-agama juga tidak selalu mengandalkan kekuatan paksa negara dalam mencegah tindakan-tindakan yang salah. Karena usaha apapun yang mengandalkan lebih banyak pada negara akan meningkatkan ongkos pemerintah, serta akan menciptakan pemerintahan totalitarian.

Sistem Kapitalisme bersifat sekuler, dengan menjadikan dikotomi antara agama dengan kehidupan duniawi, termasuk aktivitas ekonomi. Paradigma kapitalis mengabaikan nilai etika dan sosial,¹⁶ serta mengagungkan sekularisme dan tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat umum, sehingga terjadi dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara. Sistem ini gagal mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, sehingga dianggap mati.

Di sisi yang lain, Kapitalisme hanya fokus pada penyediaan alat yang dapat memuaskan kebutuhan masyarakat secara makro dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional. Kapitalisme berasumsi bahwa dengan adanya pendapatan nasional yang meningkat akan terjadi distribusi pendapatan yang merata dalam masyarakat. Dengan demikian Kapitalisme selalu bersandar pada pertumbuhan ekonomi semata untuk menghindari pembuatan pertimbangan distributif.

Pemisahan dari doktrin agama dengan menggantungkan sepenuhnya pada mekanisme harga dan keuntungan sebagai tujuan, telah menyebabkan

Kapitalisme dipandang sebagai sistem ekonomi yang mengalami kegagalan, sehingga Fukuyama menyebutnya sebagai *the end of history*.¹⁷ Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang memberikan kebebasan tak terbatas sehingga memungkinkan individu mengejar kepentingan dan memaksimalkan kekayaan demi memuaskan keinginannya.¹⁸

Penggunaan harga sebagai strategi untuk melakukan alokasi sumber daya memang melindungi kebebasan individu tetapi telah menggagalkan realisasi efisiensi dan pemerataan, kecuali diiringi dengan persaingan sempurna.¹⁹ Jika tidak maka orang kaya yang memiliki kemampuan memungkinkan untuk memperoleh apa saja yang mereka kehendaki, sedangkan orang miskin akan semakin tertekan karena pendapatannya tidak mencukupi. Orang-orang miskin akan semakin terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan.²⁰ Bahkan kesenjangan ekonomi sering terjadi, dan pemerataan ekonomi kurang diperhatikan sehingga menimbulkan ketidakadilan.

Mannan menyatakan bahwa Kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan pada superioritas kekuasaan unsur modal dan kebebasan sehingga berdampak pada distribusi pendapat yang tidak merata serta persaingan yang tidak sehat.²¹ Hal tersebut merupakan bentuk kelemahan Kapitalisme. Adapun Baqir ash-Shadr menyatakan bahwa sistem ekonomi kapitalis mendasarkan pada tiga prinsip utamanya, yaitu kebebasan dalam kepemilikan, produksi, dan konsumsi.²² Selanjutnya Naqvi menyatakan bahwa Kapitalisme memiliki beberapa karakteristik.²³ *Pertama*, Kapitalisme sangat menekankan pada nilai materialisme sehingga merusak keseimbangan. *Kedua*, Kapitalisme sangat toleran terhadap penimbunan kekayaan, sehingga kurang peduli dengan hak-hak milik orang miskin. *Ketiga*, Kapitalisme berpegang teguh pada kebebasan ekonomi individu. *Keempat*, Kapitalisme selalu memaksakan tanggung jawab sosial kepada masing-masing individu.

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa kritik Chapra terhadap kegagalan Kapitalisme lebih diorientasikan pada sebuah sistem ekonomi. Perilaku ekonomi yang lebih mengutamakan pada keuntungan individu sebagai tujuan sering digunakan untuk memberikan penilaian atas kegagalan Kapitalisme secara umum. Hal demikian tentu tidak dapat dibenarkan

karena kegagalan Kapitalisme tidak boleh hanya didasarkan pada perilaku individu, tetapi harus lebih menyeluruh. Sebagai perbandingan, jika aktivitas ekonomi umat Islam yang ditandai oleh masuknya ajaran agama dan praktek generasi awal dipandang sebagai sebuah sistem ekonomi yang islami, maka pandangan tersebut seyogyanya diterapkan juga ketika melihat Kapitalisme sebagai sistem yang terpisah dari ajaran Kristen (Protestan). Bagaimanapun juga Kristen dan Islam adalah sama-sama agama langit yang mempunyai doktrin yang sama. Ini berarti bahwa ketika melihat sebuah sistem tidak boleh hanya terpaku pada individu, atau sebaliknya perilaku individu tidak dapat dijadikan justifikasi untuk menilai pada keberhasilan atau kegagalan sebuah sistem.

Chapra juga kurang jeli dalam melihat secara objektif perjalanan sejarah terjadinya penyimpangan-penyimpangan Kapitalisme yang dilakukan individu. Chapra tidak mengelaborasi lebih jauh terhadap proses terjadinya pemisahan Kapitalisme dari doktrin dasar Kristen dan Yahudi. Hal tersebut berdampak pada terjadinya perbedaan sudut pandang antara Kapitalisme dan Islam, sehingga melihat Kapitalisme dalam konteks sistem sedangkan melihat Islam sebagai solusi dalam konteks individu.

2.2 KELEMAHAN SOSIALISME

Terjadinya sentralisasi kekayaan oleh sekelompok orang akibat penerapan etika kapitalis dalam pengembangan masyarakat industri,²⁴ telah mendorong reaksi dan protes minoritas dengan mengusung sistem Sosialisme. Sosialisme mengalami perkembangan di beberapa belahan dunia ketiga yang sering menjadi korban imperialisme kapitalis-feodal.

Sebagai sebuah ideologi, penganut Sosialisme menuntut pemerintahan yang lebih baik dan bermoral dengan penghapusan kepemilikan pribadi dan memberikan penghargaan sesuai hasil kerjanya.²⁵ Kaum sosialis mendasarkan idenya pada klaim perjuangan terhadap nilai persamaan, keadilan sosial, kerjasama, kemajuan, kebebasan individu, nihilnya kepemilikan privat, dan adanya kontrol negara atas barang produksi. Idealisme Sosialisme hendak mewujudkan nilai-nilai melalui jalur konstitusi bahkan dengan cara revolusioner akan melenyapkan Kapitalisme. Untuk mewujudkan cita-citanya, ide-ide Karl Marx menjadi rujukan utama.²⁶

Schumpeter²⁷ mendefinisikan Sosialisme sebagai suatu pola institusional di mana kontrol terhadap sarana produksi dan produksi itu sendiri tetap berada pada otoritas pusat. Benih Sosialisme sebenarnya telah lama muncul dalam sejarah masyarakat manusia di dunia. Plato, filosof Yunani abad ke-4 SM, dipandang sebagai Bapak Sosialisme. Ini berarti bahwa di Yunani telah muncul paham Sosialisme yang disebabkan oleh kesenjangan sosial dan masalah pendapatan. Selain Plato, Meng Tze, juga dapat disebut sebagai Bapak Sosialisme China karena menghendaki pemerataan kesejahteraan yang hanya dinikmati segelintir orang, yaitu para jenderal dan kaum bangsawan. Seperti Plato, Meng Tze juga menghendaki 'keadilan sosial' di bidang ekonomi, dengan adanya jaminan hukum dan politik dari negara secara pasti.

Tema utama Sosialisme sebenarnya untuk menghilangkan bentuk-bentuk eksploitasi dalam sistem Kapitalisme. Sistem Sosialisme berharap setiap individu tidak hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dalam sistem ini *private property* dan mekanisme pasar dihapus dan diganti dengan kepemilikan negara untuk semua produksi dan perencanaan yang terpusat. Sejak awal berdirinya sistem tersebut tidak memiliki ketauladanan.

Sistem ini muncul sebagai faham ekonomi dan kemasyarakatan pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 M di Eropa. Revolusi industri yang terjadi di Inggris telah memunculkan kelas baru dalam masyarakat, yaitu kaum borjuis yang menguasai sarana produksi karena penguasaan modal. Di sebaliknya sebagian besar masyarakat kota hidup sebagai buruh yang tenaga kerjanya diperas dan semakin miskin. Kekayaan yang dihasilkan karena kerja keras kaum pekerja ini hanya bisa dinikmati oleh kaum borjuis kapitalis yang jumlahnya tidak besar. Dari waktu ke waktu kesenjangan sosial dan ekonomi semakin tampak terlihat. Ketika itulah individualisme tumbuh subur.

Sosialisme, seperti telah dikemukakan, mula-mula muncul sebagai reaksi terhadap kondisi buruk yang dialami rakyat di bawah sistem Kapitalisme liberal yang tamak dan serakah. Kondisi buruk terutama dialami kaum pekerja atau buruh yang bekerja di pabrik-pabrik dan pusat-pusat sarana produksi dan transportasi. Sejumlah kaum cendekiawan muncul untuk membela hak-hak kaum buruh dan menyerukan persamaan

hak bagi semua lapisan, golongan dan kelas masyarakat dalam menikmati kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran. Mereka menginginkan pembagian keadilan dalam ekonomi.

Di antara aliran Sosialisme yang ada, Chapra mengkritisi pada 3 (tiga) aliran, yaitu marxisme, pasar, dan demokrasi.²⁸ Adapun aliran-aliran lainnya dipandang sebagai varian dari tiga arus utama tersebut. Marxisme pascarevolusi berharap dapat melakukan efisiensi dan pemerataan alokasi sumber daya, namun tidak dapat terwujud karena kelemahan serius dalam penalaran. Kecenderungan manusia memenuhi kepentingan dirinya akan menghalangi realisasi visi *utopis* Marx mengenai masyarakat yang diinginkan, yaitu masyarakat yang dari tiap-tiap orang diambil menurut kemampuannya dan mereka akan diberikan kebutuhannya.

Impian kaum marxis untuk menciptakan masyarakat *egalitarian* yang penuh dengan rasa persaudaraan tanpa ada upah, tanpa kelas sosial, dan tanpa negara tidak pernah terwujud. Kaum buruh tetap sebagai penerima upah dengan kebebasan bergerak secara sempit. Kelas sosial juga tetap ada tanpa ada perubahan signifikan. Diktator proletar tidak dapat diwujudkan, bahkan negara semakin kuat berkuasa. Alasan kegagalan marxis sangat jelas, yaitu tidak tercapainya sasaran nilai-nilai humanitarian, yaitu masyarakat tanpa kelas yang tidak dapat dieksploitasi dengan falsafah yang mendasarinya serta strategi yang dipakai. Falsafah dan strateginya bertentangan dengan sasaran-sasaran tersebut. Dengan kekuasaan yang terus menumpuk di tangan sekelompok kecil maka sirnalalah kekuatan untuk mengecek *self-interest* dan melayani kepentingan masyarakat. Karena tidak ada mekanisme filter yang secara sosial disetujui itulah maka sistem ini tetap mendorong terwujudnya hak-hak istimewa.²⁹

Terkait dengan Marxisme, Chapra menilai bahwa, Sosialisme dan Marxisme sebagai antitesis dari Kapitalisme tidak dapat diandalkan. Ideologi ini bahkan mengalami kemunduran lebih cepat dari yang diprediksikan. Ini disebabkan kelemahan-kelemahan utama yang inheren di dalamnya.³⁰ *Pertama*, ideologi ini mengimplikasikan ketidakpercayaan pada kemampuan manusia untuk mengelola kepemilikan pribadi dalam batasan-batasan kesejahteraan sosial. Semua manusia dalam kapasitasnya yang sama sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan dan pegawai pemerintahan, didorong untuk melakukan yang terbaik untuk kesejahteraan sosial tanpa

memperhatikan kepentingan pribadinya. *Kedua*, mesin kekuasaan negara dijalankan oleh sekelompok orang yang kepentingannya selaras dengan kepentingan seluruh masyarakat. Pada dataran praktik ternyata sebaliknya, sekelompok orang yang mengendalikan kekuasaan negara memanfaatkan kekayaan dan pendapatan negara untuk kepentingan pribadi. *Ketiga*, subsidi umum yang besar hanya menguntungkan si kaya dan orang-orang istimewa dibanding si miskin yang daya belinya terbatas.

Beberapa negara penganut paham sosialisme pasar tidak dapat berjalan lebih jauh dalam melakukan desentralisasi ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar sebagaimana divisualisasikan. Sistem birokrasi yang bertele-tele tetap berjalan, produktivitas terus menurun, pertumbuhan lambat, kekurangan pasokan terus meningkat. Oleh karena itu sistem Sosialisme pasar ini tetap tidak dapat berjalan karena tidak memiliki kinerja yang baik. Beberapa yang menyebabkan hal tersebut adalah: (1) karena reformasi ekonomi tidak dibarengi dengan demokrasi politik; (2) beberapa negara penganut sistem ini menghadapi *hiperinflasi* dan gelombang keresahan kaum buruh sebagaimana terjadi di Yugoslavia dan Polandia; (3) pengangguran semakin meningkat yang disebabkan oleh adanya usaha mengurangi in-efisiensi sehingga menggerogoti mesin-mesin produksi; dan (4) pinjaman hutang luar negeri meningkat secara tajam.³¹

Sementara, sosialisme demokratis merupakan produk dari filsafat sekuler pasca Pencerahan yang memperkenalkan perubahan melalui mesin distribusi Kapitalisme.³² Sistem tersebut tidak memiliki ajaran-ajaran ideologi Marx dan tidak percaya pada penggunaan kekuatan atau tidak percaya kepada kehancuran Kapitalisme yang tidak terhindarkan. Ia percaya bahwa Sosialisme sebagai suatu gagasan tidak dapat dipisahkan dari demokrasi dan harus diperjuangkan secara damai dan gradual lewat proses demokratis tanpa revolusi. Namun demikian Sosialisme demokrat tetap jauh dari targetnya dan belum mampu berbuat banyak. Strateginya juga terus mendapat kritikan tajam karena defisit anggaran yang tidak sehat dan beban pajak yang terlalu berat.³³ Sosialisme demokrat sering dipersamakan dengan Negara Kesejahteraan dengan menekankan pada aspek demokrasi ekonomi dan politik yang dikombinasikan dengan regulasi dan nasionalisasi industri, reformasi perburuhan, dan pelayanan kesejahteraan bersubsidi.

Oleh karena itu istilah komunisme memiliki sinonim dengan revolusi, perencanaan sentral, dan kepemilikan negara atas semua sarana produksi.³⁴

Sosialisme telah membuat kesalahan asumsi tentang latar belakang kondisi. *Pertama*, analisis Marxisme mengandung pengertian adanya ketidakpercayaan total terhadap kemampuan manusia untuk mengelola barang swasta dalam batas kemaslahatan manusia. Bahkan secara tersirat diasumsikan oleh Sosialisme, bahwa manusia yang sama dalam kapasitasnya sebagai konsumen, pekerja, manajer perusahaan, dan pegawai pemerintah akan selau dimotivasi untuk melakukan tercapainya kepentingan-kepentingan sosial tanpa peduli dengan kepentingan individu. Hal ini akan membawa implikasi: (a) para pekerja akan bekerja secara efisien, jujur dan tidak memperdulikan kepentingannya, meskipun tidak mendapat upah yang layak; (b) manajer perusahaan akan beroperasi secara efisien tanpa dapat melayani kepentingan dirinya sendiri, tanpa bersaing, dan tidak memiliki kemampuan membuat keputusan sendiri dalam membeli dan menjual faktor produksi; dan (c) pegawai pemerintah tidak akan mengambil keuntungan berlebihan melalui berbagai keputusan dalam kedudukannya sebagai penguasa eksekutif. Asumsi-asumsi tersebut sangat tidak realistis, karena berdampak pada buruknya motivasi dan produktivitas kerja, sehingga dapat menghambat realisasi tujuan sosial.³⁵

Kedua, diasumsikan bahwa mesin pemerintah akan dijalankan oleh sekelompok orang/pejabat yang memiliki kepentingan seirama dengan masyarakat, sehingga dapat melayani seluruh kepentingan masyarakat. Padahal dalam kenyataannya mereka memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga tidak mungkin dipenuhi semuanya oleh pemerintah. Tanpa orientasi moral tidak ada mekanisme yang dapat menciptakan keharmonisan kepentingan. Oleh karena itu asumsi ini juga tidak dapat dibenarkan, karena masyarakat memiliki kepentingan yang tidak sama sehingga tidak mungkin dapat direalisasikan oleh pemerintah semuanya. Apalagi masyarakat juga memiliki hak-hak istimewa yang muncul karena faktor struktur kekuasaan, persaingan dan asal daerah.³⁶

Ketiga, diasumsikan bahwa mesin perencanaan pusat memiliki informasi mengenai preferensi konsumen, ongkos produksi, dan harga-harga yang diperlukan. Seluruh informasi-informasi mengenai preferensi konsumen, dapat dipenuhi. Dalam kenyataan tidak demikian, karena

informasi yang demikian tidak tersedia tanpa adanya interaksi bebas antara permintaan dan penawaran di pasar. Karenanya mengutip argumentasi Hayek, Chapra berpendapat bahwa solusi sosialis terhadap masalah alokasi sumber daya adalah tidak praktis, karena informasi sempurna mengenai data-data yang relevan tidak tersedia oleh pihak pemegang otoritas. Meskipun ada akan mengalami kesulitan dalam hal membuat keputusan alokasi sumber daya bagi jutaan konsumen, barang dan jasa. Padahal tidak seluruh warga masyarakat dapat menerima keputusan dalam alokasi sumber daya yang tersentralisir.³⁷

Keempat, diasumsikan bahwa dengan adanya subsidi-subsidi besar yang terdapat dalam sistem penentuan harga akan memberi manfaat bagi orang miskin. Hal ini tidak dapat dibuktikan karena kenyataannya subsidi hanya akan memberi manfaat orang kaya. Bahkan sistem subsidi akan menyebabkan sumber daya langka akan mubazir. Umumnya subsidi-subsidi besar dalam sistem perencanaan di Uni Soviet dianggap biasa, padahal pekerjaan menetapkan harga-harga bagi barang dan jasa tidaklah mudah. Ketika harga-harga ditetapkan dan tidak berubah oleh pihak pemegang otoritas serta tidak boleh berubah karena penawaran dan permintaan, maka harga-harga tersebut menjadi sumber ketidakmerataan dan mengakibatkan bahaya besar dalam ekonomi, karena membawa dampak buruknya pada penggunaan sumber daya efisien, insentif untuk bekerja, dan penawaran jangka panjang.³⁸

Kelima, diasumsikan bahwa pertanian-pertanian besar monopolistik dan BUMN akan beroperasi secara efisien meskipun mengalami skala dis-ekonomi, kurangnya kompetisi, dan tidak adanya sinyal pasar yang baik. Hal ini merupakan kesalahan, karena ketiadaan kompetisi secara permanen telah menghapuskan insentif bagi BUMN untuk menggunakan secara ekonomis input-input atau inovasi yang dimiliki. Hal ini menunjukkan bahwa Sosialisme kehilangan sistem pasar yang menciptakan hubungan antara konsumen dan produsen yang memberikan respon independen. Tidak adanya mekanisme untuk menentukan jumlah investasi dan bagaimana menciptakan keseimbangan merupakan hal lain dari kesalahan asumsi ini.³⁹

Berbagai kesalahan asumsi Sosialisme tersebut gagal menyediakan karakteristik-karakteristik yang harus dimiliki oleh sebuah sistem. Untuk mekanisme filter yang menyaring semua klaim terhadap sumber daya agar

terjadi keseimbangan dan ketepatan penggunaan sumberdaya, justru sistem ini menunjukkan ketidakpercayaan secara penuh kepada kemampuan manusia mengelola kepemilikan pribadi. Filter yang digunakan dalam hal ini adalah perilaku dari anggota *politbiro* yang sangat berkuasa.⁴⁰ Bahkan terjadi pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah kecil anggota *politbiro*, yang kenyataannya lebih buruk dibandingkan Kapitalisme monopolistik yang meskipun telah menyebabkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan, tidak mungkin terjadi suatu pemusatan kekuasaan sebesar itu karena adanya proses pembuatan keputusan yang terdesentralisir yang biasanya dimiliki oleh pasar.

Sistem sosialis tidak mengakui kepemilikan individu kecuali pada sektor-sektor tertentu seperti alat-alat yang sederhana dan tanah yang terbatas. Begitu pula tidak diakui adanya pemindahan kekayaan melalui warisan dan investasi, sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya keadilan distribusi pendapatan.⁴¹ Oleh karena itu pendapatan masyarakat menurut sistem sosialis ditentukan oleh negara itu sendiri disesuaikan dengan pendapatan negara dan ke mana pendapatan itu diinvestasikan ditentukan oleh kebijakan pemerintah tanpa memerhatikan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain distribusi pendapatan dalam sistem sosialis tidak memperhatikan *skill* dan etos kerja masyarakat serta sejauh mana kontribusi mereka dalam proses produksi. Kompetisi di dalam sistem sosialis adalah hal yang tidak diperkenankan, sehingga dorongan untuk berprestasi dan meningkatkan produktivitas kerja akan menurun. Akibatnya sistem ini tidak mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan baik.

Untuk karakteristik sistem motivasi yang harusnya mampu mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya, justru tidak diakui oleh sistem sosialis, sehingga tidak mendorong semua individu untuk memberikan upaya terbaiknya. Apalagi ketidakmampuan sistem memberi motivasi dan dikombinasikan dengan proses pembuatan keputusan yang bertele-tele membuat informasi sumber daya tidak efisien, sehingga sistem ini tidak responsif terhadap perubahan sosial dan tuntutan ekonomi. Ini disebabkan karena perencanaan yang tersentralisasi, pelarangan hak milik pribadi, dan pengendalian penuh atas harga-harga oleh pemerintah. Di sisi lain, pemikiran utama Sosialisme tentang efisiensi dan pemerataan, tidak terwujud karena baru sedikit mengurangi ketidakmerataan. Kesenjangan

sosial dan perbedaan kelas terus berlangsung. Dalam hal sistem pasar misalnya, sistem sosialis telah gagal mencapai efisiensi dan keadilan.

Dalam banyak hal Islam tidak dapat sejalan dengan paham ekonomi sosialis. Sosialisme menolak kepemilikan pribadi dan sistem upah karena dianggap sebagai sumber kejahatan, merupakan sesuatu yang salah. Apalagi dengan menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan. demokrasi juga tidak dapat dijalankan secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingan-kepentingan istimewa.⁴²

Sementara Naqvi hanya menjelaskan tentang kelemahan Marxisme dengan melakukan perbandingan dengan Islam. Menurut Naqvi capaian-capaian ekonomi sesuai visi Marxis tidak terkait secara eksplisit dengan filsafat etika. Sosialisme berbeda dengan Islam dalam beberapa hal. *Pertama*, penghapusan total institusi kepemilikan pribadi dalam Sosialisme bertentangan dengan sikap jalan tengah Islam. *Kedua*, pandangan hidup yang menginspirasi Sosialisme berbeda dengan pandangan hidup Islam. *Ketiga*, hubungan produksi menentukan kerangka pikir dan kesadaran masyarakat sebagaimana hukum dialektika Marxis. *Keempat*, Sosialisme bersikap tidak konsisten bahkan ambivalen terhadap peran individu versus negara.⁴³

Meskipun tujuan utama Sosialisme sesungguhnya ingin menegakkan keadilan, namun pada praktiknya Sosialisme hanya mengurangi sedikit ketidakmerataan bahkan menimbulkan ketidakadilan yang lain. Dalam sistem Uni Soviet, kaum buruh tetap menjadi buruh majikan yang lebih berkuasa tanpa hak milik, dan tidak mempunyai hak untuk memilih. Perjuangan terhadap hak-hak buruh berujung pada penjara atau kematian. Dengan demikian, negara sosialis jauh lebih mematikan daripada Kapitalisme.⁴⁴ Alienasi para pekerja dari sarana produksi masih tetap, karena pusat kendali dipisahkan dari pekerja. Praktik semacam ini bertentangan dengan ajaran Marx tentang terjadinya alienasi, yaitu ketika pekerjaan terpisah dari pekerjanya. Hal ini berarti pekerjaan bukan milik pekerja sehingga dalam pekerjaannya tidak mengafirmasi dirinya sendiri. Hal ini berarti pula bahwa pekerja akan terasing dari pekerjaannya ketika pekerjaan itu milik orang lain. Dengan demikian, eksploitasi tetap terjadi sebagaimana dalam Kapitalisme, meski dikritik oleh Sosialisme.

Di sisi yang lain ideologi Sosialisme yang dipraktikkan dan direalisasikan dalam kehidupan, ternyata gagal menciptakan kesejahteraan manusia. Penyebab fundamental kegagalan ideologi Sosialisme tersebut adalah karena lahir dari pandangan masyarakat Barat sekuler dan menafikan aspek moralitas dalam kebijakan ekonomi. Sosialisme dengan kinerja perencanaan ekonomi terpusat dan kolektivitas juga telah gagal meningkatkan keadilan. Dalam konsep Sosialisme masyarakat tidak mempunyai kebebasan sedikitpun dalam melakukan kegiatan yang bernilai ekonomi. Kepemilikan individu dihilangkan diganti kepemilikan bersama dan tidak ada kebebasan untuk melakukan transaksi perdagangan. Dengan penghapusan motif laba dan pemilikan pribadi telah membunuh inisiasi motivasi dan kreativitas individu dalam sebuah masyarakat dengan suatu perspektif kehidupan dunia yang pendek.

Atas kegalan-kegalan tersebut, Sosialisme telah runtuh di Uni Soviet awal dekade 90-an dan Eropa Timur yang *notabene*-nya sebagai tempat kelahirannya. Namun demikian, kematian Sosialisme bukanlah kematian biologis. Sosialisme hanya mengalami kematian ideologis, namun tetap memiliki daya potensial untuk hidup kembali lagi selama masih ada individu atau kelompok yang mengimani Sosialisme serta mengupayakan implementasinya dalam kehidupan manusia.

Hingga saat ini Sosialisme masih diterapkan di China. Partai Komunis China yang berkuasa selama 60 tahun sejak tahun 1946 telah menjadikan Sosialisme yang berkarakteristik China dalam bidang ekonomi. Bahkan reformasi dalam bidang politik tetap terus berjalan. China telah melakukan perubahan besar dalam pandangan ekonominya dengan memasukkan nilai moral Confucius dalam setiap kebijaksanaan. Meskipun sudah mengenal pasar bebas dan memasukinya, China masih tetap memiliki ciri Komunisme yang erat melekat. Hasilnya China menjadi kekuatan ekonomi yang diperhitungkan oleh dunia. China telah menjadi negara yang perekonomiannya dan kesejahteraan masyarakatnya meningkat dengan cadangan devisa yang sangat besar.

Bagaimanapun juga China yang menganut sistem Sosialisme telah menjadi kompetitor yang signifikan terhadap Kapitalisme. Banyak keberhasilan yang telah dicapai oleh China meskipun menganut sistem Sosialisme dengan model perpaduan antara Kapitalisme yang kompetitif

dan monopoli politik yang kental. Meski demikian China tetap menghadapi persoalan, yaitu perbedaan penghasilan antara penduduk asli dan pekerja migran.

Khusus di Indonesia, beberapa cendekiawan Muslim berpendapat bahwa dalam Islam sebenarnya terdapat ajaran yang sejalan dengan pokok pemikiran yang dikemukakan oleh Sosialisme modern. Oleh karena itu Sosialisme religius telah dianjurkan sejak awal abad ke-20 oleh tokoh-tokoh seperti Cokroaminoto dan Agus Salim.⁴⁵ Sebagai tokoh Sarekat Islam, Agus Salim mengatakan bahwa gagasan tentang Sosialisme tercakup dalam ajaran agama Islam.

-
- 1 Sistem dapat didefinisikan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem ekonomi berarti organisasi yang terdiri dari bagian-bagian yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan ekonomi. Baca dalam Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).
 - 2 John Rawls, *A Theory of Justice*, (Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1971), hlm. 29.
 - 3 Crane Brinton, "Enlightment", dalam *Encyclopaedia of Philosophy*, (t.p.: t.p., 1985), hlm. 16 sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon, USA: IIT, 1995), hlm. 20.
 - 4 Sebagian orang menilai bahwa Kapitalisme lebih berhasil menyejahterakan masyarakat dibandingkan dengan Sosialisme. Baca lebih lanjut dalam Bismar Nasution, "Pengembangan Ekonomi Islam dan Kualitas Hukum Ekonomi Konvensional", makalah disampaikan pada seminar nasional Signifikansi Hukum Islam dalam Merespon Isu-isu Global, di Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 19 Juni 2004.
 - 5 Lihat dalam Adam Smith, *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations*, (New York: The Modern Library, 1937). Tesis utama karya ini adalah terkait dengan harga pasar yang sangat dipengaruhi oleh *demand* dan *suplay* sebagaimana diakui oleh sistem kapitalis selama ini, yaitu jika permintaan meningkat maka barang akan menjadi langka dan harganya akan semakin mahal. Namun jika permintaan menurun maka harga barang akan murah.
 - 6 Adam Smith (1723-1790), tokoh kelahiran Skotlandia menjadi sangat berpengaruh ketika dianggap berhasil melahirkan rasionalisasi ekonomi sehingga lahir paham rasionalisme/liberalisme. Ia dianggap sebagai bapak ekonomi Klasik. *Theory of Moral* (1759) merupakan karya pertamanya sehingga menjadi terkenal, dan puncak karya besarnya adalah *the Wealth of Nations* (1776). Lihat dalam George Soule, *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 52-63.
 - 7 Adam Smith, "The Theory of Moral Sentiments", dalam, www.blackmask.com.
 - 8 Pengajaran ilmu ekonomi *mainstream* selama ini masih bertitik tolak dari paradigma ilmu ekonomi klasikal parsial yang tidak terlepas dari asumsi-asumsi dasar sebagai mitos-mitos Kapitalisme Smithian tersebut. Lihat Sri-Edi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta, PUSTEP-UGM, 2005), hlm. 2-3.

- 9 Dapat dikutipkan di sini:....'Homo economicus' is the individual agent at the center of neoclassical economic theory (a utilitarian, hedonistic and self centred, rationalist and individualist ethical theory). He is a selfish, rational, utility maximizer. He acts independently and non cooperatively, as an isolated social atom with no sense of community or society, and his behaviour is strictly motivated by narrow self interest...". Sebaliknya "...'Homo ethicus' is completely different and indeed opposite to that of homo economicus. He is an altruistic and cooperative individual, honest, truth telling, trusty and who trusts others. He drives moral and emotional well-being from honouring his obligations to others, has a strong sense of duty and strong commitment to social goals...". Baca dalam M. Teresa Lunati, *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, (London: Mac Millan Press, 1997), hlm. 139-140.
- 10 Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, *al-Iqtishad al-Islami: al-Iqtishad al-Juz'i*, Jilid 3, (Irak: Dar al-Bayan, 1985), hlm. 407.
- 11 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon, USA: IIIT, 1995), hlm. 52.
- 12 Baca lebih lanjut dalam *Ibid.*, hlm. 17-62
- 13 Lihat misalnya dalam, M. Umer Chapra, "The Need For A New Economic System", dalam *Review of Islamic Economics*, (Journal of the Islamic Economic Association, Vol. 1, No.1, 1991), hlm. 9-47; dan M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 18.
- 14 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 20-21.
- 15 *Ibid.*, hlm. 18.
- 16 Khurshid Ahmad, dalam pengantar bukunya M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (UK: The Islamic Foundation, 2000), hlm xi-xix.
- 17 Baca lebih lanjut dalam Francis Fukuyama, *The End of History and the Last Man*, (New York: Avon Books, 1992).
- 18 M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (UK: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 37.
- 19 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 343.
- 20 M. Umer Chapra, *The Future of Economics....*, hlm. 36.
- 21 Lihat lebih lanjut dalam Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, (Cambridge: The Islamic Academy, 1986).
- 22 Muhammad Baqir ash-Shadr, *Iqtishaduna*, (Beirut: Dar al Ma'arif, 1987), hlm. 241-243.
- 23 Baca lebih lanjut dalam Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics, and Society*, (London & New York: Kegan Paul International, 1994), hlm. 76.
- 24 Bernard Crick, *Sosialisme*, (Surabaya: Pustaka Promothea, 2001), hlm. 50.
- 25 Eko Supriyadi, *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syariati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 8-9.
- 26 *Ibid.*, hlm. 10.
- 27 Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism, and Development*, (1950), hlm 167, sebagaimana dikutip oleh M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 101-102.
- 28 Lihat dalam M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 71-107.
- 29 *Ibid.*, hlm. 90-91.
- 30 Norman Furniss dan Timothy Tilton, *The Case of Welfare State: From Social Security to Social Equality*, (Bloomington, Indiana: International Union Press, 1977), hlm. 42, sebagaimana dikutip M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 87-88.
- 31 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic....*, hlm. 96-100.
- 32 *Ibid.*, hlm. 106.
- 33 *Ibid.*, hlm. 101-106.
- 34 *Ibid.*, hlm. 102.
- 35 *Ibid.*, hlm. 78.
- 36 *Ibid.*, hlm. 79.
- 37 *Ibid.*, hlm. 80.

- 38 *Ibid.*, hlm. 81-82.
- 39 *Ibid.*, hlm. 78-83.
- 40 M. Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 372.
- 41 Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, *al-Iqtishad al-Islami...*, hlm. 407.
- 42 M. Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 76.
- 43 Syed Nawab Haider Naqvi, *Islam, Economics and Society*, (London & New York: Kegan Paul International, 1994), hlm. 72-75.
- 44 Norman Furniss dan Timothy Tilton, *The Case of Welfare State...*, hlm. 42, sebagaimana dikutip M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 87-88.
- 45 Di antara tokoh-tokoh Islam yang berpendapat demikian antara lain Muhammad Iqbal dan Muhammad Husein Heikal. Tokoh-tokoh Islam lain yang berpikiran seperti itu adalah Muhammad Hatta, Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Nurcholis Madjid, Mubyarto dan lain-lain. Syafrudin Prawiranegara (1955) mengatakan bahwa seorang Muslim haruslah sekaligus seorang sosialis. Tidak mengherankan karenanya oleh Kahin menyebut Masyumi sebagai partai Islam Sosialis, karena tokoh-tokoh sering mengemukakan bahwa Sosialisme telah terdapat dalam ajaran Islam, sebagaimana dalam agama-agama samawi lain seperti Yahudi dan Kristen klasik, serta dalam agama Zoroaster, khususnya aliran Mazdak. Perilaku atau kebijakan ekonomi yang tidak mampu menopang, apalagi menghalangi terwujudnya keadilan sosial dikutuk dengan keras dalam kitab suci agama-agama tersebut. Baca Abdul Hadi. W.M, "Islam, Marxisme dan Persoalan di Indonesia", dalam <http://icasparamadinauniversity.wordpress.com/2012/10/12/islam-marxisme-dan-persoalan-Sosialisme-di-indonesia/> dikases tanggal 5 Desember 2012.

3

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN; SEBUAH KRITIK

Ekonomi dan pembangunan merupakan dua istilah yang salah berdekatan dalam kerja untuk kesejahteraan sebuah kehidupan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan akan berjalan dengan baik dan mampu memenuhi kesejahteraan masyarakatnya jika sebuah sistem ekonomi berjalan sesuai dengan kondisi masyarakatnya. Ketika ekonomi konvensional dianggap kurang mampu mengatasi pembangunan kesejahteraan sebuah masyarakat, muncullah kemudian berbagai sistem yang lainnya.

Bagian ini tidak berpretensi untuk melihat kemunculan sistem baru, namun sebagai bentuk kritik awal bahwa sistem konvensional kurang mampu meningkatkan kesejahteraan sebuah masyarakat. Oleh karena itu penulis awali dengan bagian yang mengupas krisis negara kesejahteraan (welfare state) dan juga kritik terhadap sistem ekonomi konvensional.

3.1 KRISIS NEGARA KESEJAHTERAAN

Adanya hubungan yang selalu terkait dan saling mempengaruhi antara ekonomi dengan politik, telah melahirkan berbagai aliran dan paham ekonomi, antara lain merkantilisme, liberalisme, dan Negara Kesejahteraan. Adanya peran dominan negara dalam menetapkan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan faktor-faktor produksi dan distribusinya merupakan usaha menegakkan keadilan sebagaimana dianut merkantilisme.¹ Paham ekonomi merkantilis menyatakan bahwa negara merupakan faktor positif

pemimpin dalam perekonomian. Aliran ini bertujuan untuk memperkuat negara dengan sistem akumulasi kekayaan atau kapital, dengan memberi prioritas dalam pembangunan ekonomi.

Hal tersebut berbeda dengan aliran ekonomi liberal yang menghendaki negara tidak ikut campur tangan jalannya perekonomian dengan membiarkan setiap individu mencari kesejahteraan dalam sistem pasar bebas. Sistem liberalisme lahir karena dorongan terjadinya pengakuan hak milik perseorangan dan penyerahan alokasi sumber daya manusia kepada mekanisme pasar,² sebagai usaha untuk menghapus ketidakadilan. Selanjutnya muncul *counter* terhadap liberalisme, karena mekanisme pasar dianggap tidak bisa menghasilkan lapangan pekerjaan, sehingga negara harus turun tangan untuk investasi demi menghidupkan kembali mekanisme pasar. Hal tersebut mendorong munculnya konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Konsep Negara Kesejahteraan bertujuan ingin menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Negara Kesejahteraan (*welfare state*)³ merupakan langkah maju dari Kapitalisme. Konsep Negara Kesejahteraan digagas sebagai salah satu alternatif dari pertarungan ideologi pada abad ke-20 antara Kapitalisme dan Sosialisme yang telah berdampak pada miliaran umat manusia. Di Barat dan bahkan di negara Muslim sendiri telah melupakan bahwa ada satu sistem yang bisa menjadi alternatif, yaitu sistem Negara Kesejahteraan.

Tujuan Negara Kesejahteraan adalah melunakkan eksistensi Kapitalisme yang berlebihan demi mengurangi daya tarik Sosialisme. Sistem ini cukup menarik semua lapisan masyarakat, baik pekerja maupun kapitalis. Dari segi filosofinya, Negara Kesejahteraan meyakini bahwa kesejahteraan individu merupakan tujuan yang sangat penting yang tidak hanya tergantung pada operasi kekuatan pasar. Negara Kesejahteraan juga beranggapan bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang bukan merupakan bukti dari kegagalannya. Karena itu, sistem ini mengakui *full employment* dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sebagai bagian dari tujuan pokok kebijakan negara.

Pada awalnya konsep Negara Kesejahteraan dipandang sebagai sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam

memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya. Spicker, misalnya, menyatakan bahwa Negara Kesejahteraan "... stands for a developed ideal in which welfare is provided comprehensively by the state to the best possible standards".⁴ Paham ini menuntut peran negara yang lebih aktif dalam bidang ekonomi dibandingkan peranannya di bawah paham Kapitalisme *laissez-faire*. Oleh karena itu Negara Kesejahteraan mengacu pada peran pemerintah yang responsif dalam mengelola dan mengorganisasikan perekonomian sehingga mampu menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya. Konsep ini dipandang sebagai bentuk keterlibatan negara dalam memajukan kesejahteraan rakyat setelah mencuatnya bukti-bukti empirik mengenai kegagalan pasar (*market failure*) pada masyarakat kapitalis dan kegagalan negara pada masyarakat sosialis.

Negara Kesejahteraan memperoleh momentum setelah depresi yang terjadi pada tahun 1930 di Amerika dan sebagai respon terhadap tantangan Kapitalisme dan kesulitan-kesulitan yang terjadi karena depresi dan perang. Falsafah yang mendasarinya menunjukkan suatu gerakan menjauhi prinsip-prinsip Darwinisme sosial dari Kapitalisme *laissez-faire* dan menuju kepada kepercayaan bahwa kesejahteraan individu merupakan sasaran yang amat penting, yang realisasinya diserahkan kepada operasi kekuatan-kekuatan pasar. Falsafah ini berarti merupakan pengakuan formal-formal utama ekonomi bahwa kemiskinan dan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhannya tidak berarti bukti kegagalan individu tersebut.

Negara Kesejahteraan dipandang sebagai jalan tengah antara ideologi Kapitalisme dan Sosialisme. Namun demikian konsep ini justru tumbuh subur di negara-negara demokratis dan kapitalis, bukan di negara-negara sosialis. Di negara-negara Barat, Negara Kesejahteraan sering dipandang sebagai strategi 'penawar racun' Kapitalisme, yakni dampak negatif ekonomi pasar bebas. Karenanya, *welfare state* sering disebut sebagai bentuk 'Kapitalisme baik hati'.

Meski dengan model yang berbeda, negara-negara kapitalis dan demokratis seperti Eropa Barat, Amerika Serikat, Australia dan Selandia Baru adalah beberapa contoh penganut *welfare state*. Sedangkan, negara-negara di bekas Uni Soviet dan Blok Timur umumnya tidak menganut *welfare state*, karena mereka bukan negara demokratis maupun kapitalis. Oleh karena itu,

meskipun menekankan pentingnya peran negara dalam pelayanan sosial, Negara Kesejahteraan pada hakekatnya bukan merupakan bentuk dominasi negara, melainkan wujud dari adanya kesadaran warga negara atas hak-hak yang dimilikinya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Negara diberi mandat untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam memenuhi hak-hak warga negara.

Dalam mewujudkan cita-cita dan tujuannya, Negara Kesejahteraan tidak mengakui pentingnya melakukan perubahan radikal dalam sistem pasar. Peran pemerintah diarahkan untuk memperbaiki fungsi pasar dan mengoreksi ketidakmerataan akibat Kapitalisme *laissez-faire*. Untuk mewujudkan hal tersebut Negara Kesejahteraan mengakui enam alat, yaitu regulasi, nasionalisasi industri pokok, serikat perburuhan yang kuat, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan kesempatan kerja (*full employment*).⁵

Dari enam alat tersebut, maka kebijakan fiskal merupakan alat utama bagi Negara Kesejahteraan yang meliputi penggunaan belanja pemerintah, perpajakan progresif, dan pinjaman untuk mencapai sasaran yang diinginkan.⁶ Meski sistem ini menerapkan strateginya melalui enam perangkat negara tersebut -regulasi, nasionalisasi industri pokok, gerakan buruh, kebijakan fiskal, pertumbuhan yang tinggi dan *full employment*-, namun subsidi umum telah melahirkan kepincangan yang tidak adil antara si kaya dan si miskin.

Di negara-negara Dunia Ketiga, ekonomi feodal tanpa regulasi industri yang jelas telah menghasilkan konsentrasi sumber daya paling produktif pada tangan orang-orang kaya yang sangat sedikit jumlahnya, sementara kebanyakan warga lain hidup miskin dalam kemelaratan urban atau pedesaan-pedesaan miskin. Kesenjangan antara kaya dan miskin menjadi semakin lebar. Contoh-contoh semacam ini dapat dijumpai pada negara-negara di Asia Tenggara. Di negara-negara tersebut terjadi proses *aristokrasi* di kalangan borjuis membuat mereka lebih menginginkan monopoli dan mengubah laba menjadi rente. Di samping itu para birokrat pemerintah mencari kekayaan dengan menyewakan kekuasaan birokrasinya kepada para kroni. Bahkan di negara-negara tersebut tumbuh hubungan-hubungan ekonomi patron-klien antara para penguasa politik dalam birokrasi dan para pengusaha serta kelompok-kelompok usaha tertentu.⁷

Seorang Pemikir Ekonomi Islam, Chapra, pada awalnya sangat *respect* terhadap konsep Negara Kesejahteraan yang dianggap sebagai perkembangan besar dari filsafat kaum Darwinis-Sosial, dari unsur dan tujuan Negara Kesejahteraan yang mengandung unsur prikemusiaan, sehingga dapat sesuai dengan Islam.⁸ Akan tetapi pada kenyataannya, ekonomi Kapitalisme tidak berhasil membangun sebuah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan *welfare state*, atau bentuk perubahan fundamental secara menyeluruh. *Welfare state* masih sangat kekurangan dengan mekanisme dan sistem-sistem efektif yang dapat membantu untuk menciptakan tujuan-tujuan *egaliter*.

Menurut Chapra, pembangunan *welfare state* di negara-negara Barat pada dasarnya tidak perlu melakukan suatu perubahan yang bersifat mendasar dalam sistem pasar. Karena peran negara yang lebih besar cukup terbukti dalam meningkatkan fungsi pasar dan memperbaiki ketidakadilan yang diciptakan oleh Kapitalisme *laissez-faire*. Chapra sepertinya bersikap *apriori*, bahwa konsep Kapitalisme dengan Negara Kesejahteraan akan berkesesuaian, karena Kapitalisme bersifat individualis, sedangkan Negara Kesejahteraan bersifat sosial. Dengan demikian terdapat kepincangan dan kontradiksi antara dua konsep tersebut yang tidak mudah dipadukan.

Chapra secara detail mengkritisi tentang Negara Kesejahteraan yang dikembangkan oleh negara-negara berbasis faham Kapitalisme. Walaupun pada prinsipnya Chapra mengamini *welfare state* sebagai sesuatu yang fenomenal, namun itu menjadi sesuatu yang tidak maksimal. Karena Chapra melihat *design* Negara Kesejahteraan dipayungi oleh faham Kapitalisme yang secara filosofis sarat dengan individualisme, kompetisi liberal dan sistem pasar bebas yang tidak mencerminkan dan memberikan jaminan pasti terhadap eksistensi hak individu lain dalam masyarakat yang mendapatkan standar hidup minimum.

Chapra juga menemukan data-data kuantitatif yang menunjukkan bahwa terdapat berbagai kepincangan strategi dan logika yang sering digunakan oleh Kapitalisme. Logika tersebut adalah perhitungan yang dilakukan dalam mengatasi kelangkaan dan penyusutan sumber daya Negara Kesejahteraan dengan cara 'sistem harga' yang dinaikkan, agar penggunaan sumber daya langka menjadi menurun. Chapra tidak sependapat dengan logika tersebut, karena tanpa adanya usaha untuk melakukan kesepakatan

yang mengatur *preferensi* individu dalam mengkonsumsi sumber daya, maka akan berdampak pada terjadinya kelangkaan dengan prioritas-prioritas dan mekanisme yang disepakati bersama.⁹

Meskipun Negara Kesejahteraan telah memperbaiki kondisi kelompok miskin di negara industri, namun dalam kenyataannya kemiskinan tetap menonjol dan tetap berlangsung. Jarak antara kemakmuran tetap menganga, baik dalam aspek pendapatan riil, kesehatan, perumahan, maupun pendidikan. Dengan demikian impian masyarakat egalitarian tetap jauh dari kenyataan meskipun kekayaan melimpah dan ada Negara Kesejahteraan. Bahkan beberapa negara menghadapi kelangkaan sumber daya. Atas hal tersebut Chapra berpendapat pentingnya pembangunan prioritas berdasarkan mekanisme filter yang secara sosial disepakati dan memotivasi orang untuk mereorientasi preferensi. Namun karena Negara Kesejahteraan beroperasi dalam kerangka kerja Kapitalisme sekuler maka tidak memiliki mekanisme yang dapat mengantarkan pada konsensus tentang prioritas pembangunan dan motivasi individu sesuai tuntutan keseimbangan makroekonomi, eksternal, dan sasaran distribusi.¹⁰

Negara Kesejahteraan memiliki konsep yang semestinya bagus untuk dilaksanakan karena sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil. Namun oleh karena pengaruh sistem Kapitalisme yang memberikan peluang individu lebih leluasa dalam mengeksploitasi modal kapitalnya demi untuk kepentingan produksi, maka Negara Kesejahteraan dalam praktiknya menjadi tidak sesuai dengan tujuan semula.

Selain menelaah Negara Kesejahteraan ala Kapitalisme, Chapra juga mengeksplorasi berbagai *domain* yang mencerminkan Islam sebagai agama juga mengajarkan tentang kesejahteraan negara dan sosial secara normatif (bersumber dari nash al-Qur'an dan Hadis).¹¹ Chapra merangkum suatu kerangka pikir yang disertai dengan penjelasan-penjelasan normatif tentang hubungan suatu politik negara Islam dengan pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan umat. Chapra berpendapat bahwa terciptanya Negara Kesejahteraan adalah sesuatu yang komprehensif dengan berbagai kebijakan yang kolektif.

Menurut Chapra, mengutip pendapat Richard M. Titmuss, bahwa kajian *welfare state* sebagai 'abstraksi yang tidak bisa didefinisikan' dan tidak

dapat disepakati bersama.¹² Dengan demikian diketahui bahwa Chapra mengkritik konsep Negara Kesejahteraan sebagai suatu yang *indefinitif*, abstrak dan subyektif. Kritik-kritik Chapra tersebut dapat diklasifikasikan pada dua hal besar. *Pertama*, terletak pada kritiknya terhadap konsep Negara Kesejahteraan sebagai suatu bagian dari sistem kapitalis yang hanya berpotensi dapat memberikan kesejahteraan pada konglomerat (pemilik modal). *Kedua*, kritiknya pada praktek (kebijakan) Negara Kesejahteraan yang terbukti telah kehilangan momentum.

Menurut Chapra, aspek-aspek yang telah menghambat pelaksanaan konsep Negara Kesejahteraan terletak pada filosofi, kepincangan strategi, dan logika Kapitalisme. Falsafah Kapitalisme adalah kesejahteraan individu yang lebih menekankan pada persaingan pasar, pentingnya *full employment*, dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, yang berimplikasi pada peran aktif suatu negara dalam ekonomi.¹³ Chapra mengutip Fukuyama,¹⁴ bahwa filosofis individualis di dunia Barat telah membawa 'kekacauan yang besar' yang ditandai dengan sistem keluarga yang memudar. Pada saat kepentingan sosial tertentu telah terjamin secara ekonomi melalui sistem kompetisi dan Negara Kesejahteraan, namun ternyata tidak ada yang menjamin integritas keluarga. Hal yang demikian pada akhirnya menjadikan kepentingan ekonomi telah menyebabkan *unitas* (persatuan) dalam suatu keluarga menjadi sesuatu yang *nisbi*.¹⁵ Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dikritik Chapra mengenai falsafah Kapitalisme adalah kesejahteraan individu dan mengabaikan orang lain atau masyarakat luas.

Secara khusus Chapra juga mengkritisi pada efektifitas enam fungsi perangkat *welfare state* yang terdiri dari regulasi, nasionalisasi industri, gerakan tenaga kerja yang tinggi, kebijakan fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan *full employment*.¹⁶ Keenam fungsi perangkat tersebut pada kenyataan telah kehilangan momentum sehingga tidak dapat memberi efektifitas. Terkait dengan regulasi, Chapra menyatakan bahwa regulasi yang adil sangat diperlukan untuk mengatur kompetisi perusahaan swasta dalam kriteria dan nilai yang disepakati untuk menjaga standar konsumen. Jika tidak disepakati secara universal, maka dalam masyarakat plural, di mana setiap individu mengejar kepentingan pribadinya, negara yang semestinya netral akan diperalat untuk kepentingan kelompok atau kepentingan pribadi

dan kegiatan negara hanya akan menjadi sebuah hasil tawar menawar dari pergulatan politik.¹⁷ Padahal jika regulasi apapun yang akan dilaksanakan mendapat tekanan politik,¹⁸ maka akan sulit memiliki keseimbangan regulasi untuk merealisasikan keadilan dalam masyarakat yang plural.

Dalam Negara Kesejahteraan yang kapitalis, regulasi yang selama ini berjalan cenderung menguntungkan orang-orang kaya dan berkuasa yang dengan kekuatan potensinya dapat mengontrol media berita, sehingga regulasi justru mendukung kepentingannya. Terdapat suatu kecenderungan yang berlebihan atau kurang baik kepada kelompok yang menguasai suara politik, media massa, bermodal besar, bahwa kelompok ini dalam kepentingannya akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk melindungi kepentingannya. Sehingga, bisa jadi regulasi akan menjadi tanpa nilai karena hanya mendukung suatu kelompok tertentu. Apalagi jika regulasi ini terkait dengan kekuatan ekonomi dan organisasi serta sumber-sumber daya yang tersedia akan menjadi perebutan berbagai kepentingan, dan berimplikasi pada distribusi yang tidak adil, sehingga terjadi ketidakseimbangan.

Regulasi yang tercipta dalam *welfare state*, tidak akan berjalan jika perundang-undangan yang dibuat tidak untuk meningkatkan keadilan sosio-ekonomi dan dilaksanakan secara efektif oleh kekuasaan pemerintah tanpa paksaan dan motivasi serta pengorbanan dari seluruh lapisan masyarakat demi terwujudnya tujuan-tujuan yang diinginkan. Karenanya regulasi harus mencerminkan suatu kondisi bahwa: (a) pemerintahan mendapat dukungan dari suatu kekuatan mekanisme motivasi yang diciptakan dalam kualitas pendidikan dan transformasi moral masyarakat, dan (b) tercipta keinginan yang kuat dalam diri individu untuk menaati regulasi di atas kepentingan pribadi dan kelompok, sehingga segala upaya akan dilakukan untuk menghindari diri dari regulasi dan memanfaatkan celah-celahnya yang ada dalam setiap regulasi, dengan tanpa memandang bagaimana regulasi tersebut dibuat.¹⁹

Terkait dengan program nasionalisasi, Chapra menyatakan bahwa program ini telah kehilangan momentum, terutama pada saat program privatisasi telah menjadi *trend* dan telah lama berjalan di Eropa Barat bahkan sampai ke China, Eropa Timur dan beberapa negara bekas Uni Soviet. Apalagi hal ini jika dikaitkan dengan sebab adanya kekecewaan umum terhadap kinerja industri-industri jika dinasionalisasikan, dan besarnya

subsidi yang dibutuhkannya supaya bisa bertahan. Hal penting lainnya adalah jika dikaitkan dengan kondisi politik yang melingkupinya.²⁰ Yang demikian itu menunjukkan bahwa program nasionalisasi sudah tidak dapat dipraktikkan.

Terkait dengan gerakan serikat buruh, Chapra berpendapat bahwa terjadinya inflasi dan tingginya angka pengangguran telah membuktikan gerakan serikat buruh tidak dapat memberikan bantuan positif dalam peningkatan pendapatan buruh, kondisi kerja, dan rasa keamanan. Gerakan serikat buruh sulit menjadi solusi bagi pengangguran, karena beberapa serikat hanya dipacu oleh keinginan untuk mengejar kepentingan individu. Beberapa bukti bahwa serikat perdagangan seperti di Inggris, anggotanya merosot hingga 24%. Bahkan sebagian besar anggotanya tidak terlibat aktif dan komitmen kepada serikat.²¹ Di Jerman Barat, Jepang dan Prancis, anggota serikat lebih sedikit, dan di Amerika Serikat bahkan lebih parah lagi yaitu hanya mencapai 19% pekerja.²²

Meskipun kaum industrialis selama ini setuju dengan gerakan serikat perdagangan, namun bukan berarti kaum industrialis menjunjung tinggi keadilan sosio-ekonomi. Bahkan sebaliknya, mereka lebih banyak didorong oleh keinginan untuk mengambil suatu keuntungan positif bagi sistem industri dalam menciptakan keharmonisan hubungan manajemen dengan buruh dalam kontrak kerja dan standarisasi gaji. Lebih ironis lagi ternyata gerakan serikat buruh hanya untuk meningkatkan stabilitas dan prediktibilitas lingkungan ekonomi yang sangat diperlukan dalam akumulasi modal dan pertumbuhan produksi.²³

Mengenai kebijakan fiskal, Chapra menyoroti krisis yang terjadi dalam Negara Kesejahteraan terkait dengan pengeluaran pemerintah, tingkat pajak dan defisit yang tinggi, ketidakadilan subsidi, pajak progresif, dan kesenjangan sosial. Pengeluaran pemerintah yang lazim dilakukan oleh suatu negara, meliputi pertahanan, administrasi umum dan pelayanan ekonomi. Untuk meningkatkan fungsi *welfare state* dalam meningkatkan pertumbuhan, stabilitas ekonomi dan persamaan pendapatan, Negara Kesejahteraan menjalankan fungsi-fungsi pengeluaran pemerintah demi mewujudkan pertumbuhan eksponensial dalam pengeluaran umum dan perpajakan.

Pengeluaran pemerintah yang tidak terkontrol, telah ditekan agar memotong pengeluaran. Pemerintah tidak meletakkan prioritas sesuai dengan tujuan sosio-ekonomi yang disepakati, namun menempuh strategi pemotongan kecil.²⁴ Hal ini sangat relevan jika dikaitkan dengan kebijakan yang biasanya dilakukan dalam Negara Kesejahteraan. Prioritas pemotongan adalah pengeluaran investasi pemerintah dan pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat. Namun demikian kemungkinan rugi tetap besar karena pemotongan semacam ini tidak bisa berlangsung lama tanpa merugikan prospek pertumbuhan masa depan negara dan stabilitas sosial atau menurunkannya dukungan politik untuk partai berkuasa.

Di samping itu adanya tingkat pajak yang tinggi dan pinjaman untuk membiayai pengeluaran, telah menunjukkan adanya sebuah dimensi yang bermasalah dan tidak sehat di seluruh struktur keuangan publik di semua Negara Kesejahteraan. Defisit yang tinggi memiliki sejumlah implikasi, seperti inflasi, menaikkan suku bunga dan mendesak investasi sektor swasta. Jika terjadi defisit berkelanjutan, maka untuk menarik modal asing akan memaksa negara agar mempertahankan suku bunga yang tinggi. Hal yang demikian dapat merugikan pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja dan keuangan.

Negara Kesejahteraan juga gagal mengurangi kesenjangan pendapatan dan kekayaan dalam pengeluaran umum, beban pajak, sehingga defisit naik sangat tinggi. Hal ini diperburuk dengan hilangnya mekanisme filter yang disepakati dari nilai-nilai kemanusiaan dan pertimbangan nilai, sehingga semakin menjauhkan Negara Kesejahteraan dari prioritas jangka panjang dalam rencana pengeluaran. Bahkan mengakibatkan terjadinya perlakuan sama antara si kaya dan si miskin dalam mengambil manfaat dari pengeluaran umum dalam bidang pendidikan, kesehatan dan berbagai bentuk subsidi barang dan jasa.²⁵

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa subsidi umum cenderung lebih menguntungkan orang kaya daripada orang miskin, khususnya subsidi dalam bentuk barang-barang dan jasa yang lebih banyak dikonsumsi oleh orang kaya. Subsidi harga yang ditawarkan melalui nasionalisasi industri telah membawa hasil yang sama-sama tidak baiknya. Karena itu ekspansi pelayanan umum dalam bentuk pemberian gratis atau subsidi di

Negara Kesejahteraan lebih banyak menguntungkan orang kaya daripada orang miskin, sehingga dapat mengakibatkan ketidakadilan.

Pajak progresif diharapkan dapat menurunkan kesenjangan dan merupakan satu-satunya metode yang benar dan menjanjikan. Namun ternyata pajak progresif bukan saja tidak memainkan suatu peranan redistribusi yang berarti, tetapi mungkin juga telah diterapkan dalam arah yang berlawanan di beberapa negara.²⁶ Sekalipun sistem pajak cukup potensial untuk melakukan suatu redistribusi yang berarti, namun serangan Negara Kesejahteraan dan serangan pada sisi penawaran telah menyebabkan tuntutan pengurangan tingkat pajak individu dan perusahaan, bukan mengadakan reformasi suatu sistem pajak untuk mencapai keadilan yang lebih besar.²⁷ Meskipun ada peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak progresif yang jelas, kesenjangan pendapatan dan kekayaan bukan semakin menurun namun sebaliknya semakin meningkat.

Terkait pertumbuhan tinggi, perangkat alat Negara Kesejahteraan diharapkan sesuai dengan keterbatasan untuk tidak membuat penilaian dan perbandingan antar individu. Pada kenyataannya, beberapa penulis menganggap redistribusi tanpa pertumbuhan sebagai sesuatu yang meragukan. Bagi Chapra pertumbuhan akan menjadi satu-satunya metode yang cocok untuk redistribusi. Namun dalam kenyataannya selama dua dekade tingkat pertumbuhan yang tinggi dan peningkatan kekayaan yang terus membesar telah terbukti gagal memberantas kemiskinan, memenuhi kebutuhan dan menurunkan ketidakmerataan. Bahkan di negara-negara terkaya di dunia, seperti Amerika Serikat dan Jepang atau negara-negara yang berorientasi tinggi terhadap kesejahteraan, seperti Jerman, Inggris dan Swedia, beberapa kebutuhan primer masyarakat miskin khususnya pendidikan, sarana kesehatan dan perumahan, tetap tidak terpenuhi.²⁸

Terkait pengangguran yang telah menjadi problem utama bagi negara-negara industri di Barat telah menghambat usaha untuk meningkatkan lapangan kerja. Padahal hal ini merupakan cara penting untuk meningkatkan kondisi rakyat miskin. Jika demikian maka sangat kecil kemungkinannya pengangguran akan turun secara berarti pada masa mendatang. Yang lebih mencemaskan lagi adalah tingkat pengangguran generasi muda yang lebih tinggi dari tingkat rata-rata, sehingga meningkatkan rasa permusuhan mereka terhadap masyarakat, dan merugikan kemampuan dan potensi

mereka.²⁹ Problem yang dihadapi Negara Kesejahteraan adalah bagaimana menghapuskan ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistem ini tidak memiliki mekanisme filter yang disepakati kecuali pada harga untuk mengatur permintaan pasar secara *agregat*. Sistem ini bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menghapuskan ketidakseimbangan yang ada.³⁰

Regulasi dan kebijakan Negara Kesejahteraan ala kapitalis yang telah berjalan tidak sesuai dengan program Negara Kesejahteraan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dari aspek program perlindungan negara terhadap masyarakat, terutama kelompok lemah seperti orang miskin, penderita cacat fisik, serta pengangguran. Hal tersebut tentu sangat bagus sebagai koreksi terhadap Kapitalisme yang pada kenyataan sekarang terbukti tidak *egaliter*.

3.2 INKONSISTENSI EKONOMI PEMBANGUNAN

Ekonomi Pembangunan telah mengalami tiga fase yang berbeda. *Pertama*, fase Ekonomi Pembangunan kuno yang dikembangkan oleh para ekonom klasik yang mencoba menjelaskan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dalam kerangka kerja Kapitalisme liberal *laissez faire*. *Kedua*, fase perpindahan dari ekonomi liberal klasik dan ekonomi neoklasik yang memperkecil ketergantungan pada peran pasar dan pemerintah dalam ekonomi. Pada fase ini sangat tergantung pada strategi Keynesian dan sosialis, sampai terjadinya kebangkitan kembali ekonomi neoliberalisme dan neoklasik. *Ketiga*, fase antikeusangan dan pro pada kebebasan pasar. Fase ini diawali dengan adanya pandangan bahwa dominasi negara dalam perekonomian telah mendatangkan problem, terutama dalam penggunaan sumber daya yang tidak efisien, ketidakseimbangan ekonomi makro dan eksternal, ketidakmerataan kekayaan dan pendapatan, serta kesenjangan sosial.³¹ Meski dipandang berguna oleh para pendukungnya, namun beberapa kalangan meragukan legitimasi disiplin ini.

Ekonomi Pembangunan tidak memiliki identitas sendiri karena merupakan cabang dari tiga aliran utama ekonomi, yaitu neoklasik, Keynesian, dan sosialis, di mana ketiganya memiliki akar dalam pandangan Barat. Pendekatan mengenai realisasi manusia dan analisis persoalan selalu

berdasarkan pada sekularisme. Pandangannya lebih menekankan pada konsumsi dan kepemilikan materi sebagai sumber kebahagiaan manusia dengan mengabaikan peran nilai-nilai moral dalam reformasi sosial dan pembangunan, serta terlalu menekankan peran pasar dan negara. Sistem ini tidak memiliki komitmen terhadap persaudaraan dan keadilan sosio-ekonomi, serta tidak memiliki mekanisme filter dan nilai moral yang disepakati secara sosial. Falsafah yang dipegang adalah matrealisme dan darwinisme sosial sehingga tidak ada motivasi melayani kepentingan sosial kecuali terdapat kepentingan individu.³²

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara berkembang dalam mewujudkan pemerataan dan efisiensi menyebabkan kebangkitan kembali ekonomi neoklasik. Ajaran pokok neoklasik dalam memecahkan persoalan alokasi dan distribusi di negara berkembang adalah bagaimana mendapatkan harga yang tepat melalui mekanisme pasar agar memberi sinyal positif bagi agen ekonomi.³³ Para ekonom neoklasik menekankan strategi penyesuaian dengan mengikuti pola liberalisasi sebagaimana diungkapkan dalam terminologi netral nilai dari teori Pencerahan. Liberalisasi menganjurkan pemangkasan keseluruhan pengeluaran pemerintah. Liberalisasi dan orientasi ekspor memang telah berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, tetapi keduanya bukan utama karena ada faktor yang lebih penting, yaitu intervensi substansial pemerintah, keadilan sosial ekonomi dan keharmonisan sosial, tingginya untuk menabung dan investasi, serta dukungan aktif impor-substitusi dan ekspor promosi.³⁴

Dengan pendekatan neo-klasikal yang bebas nilai, maka Ekonomi Pembangunan juga dianggap tidak efektif dan telah gagal, karena tidak dapat merealisasikan pemerataan berdasarkan nilai-nilai yang disepakati secara sosial, tidak memiliki motivasi, serta tidak dapat melakukan restrukturisasi ekonomi. Ini hanya efektif jika tetap dapat melayani setiap orang yang merupakan faktor penting untuk mendorong inisiatif dan efisiensi. Dengan pendekatan ekonomi yang berbau sosialis-Darwinis disertai dengan *ethnosentris*, Sosialisme telah menanamkan benih pesimisme mengenai prospek pembangunan dengan menilai bahwa kemiskinan, keterbelakangan, dan penguasaan secara politik disebabkan oleh *inferioritas* mental, ras, maupun kultur.

Tendensi kaum sosialis dalam Ekonomi Pembangunan tidak merefleksikan keprihatinan atas pemerataan, tetapi hanya merefleksikan keinginan mempercepat pertumbuhan melalui penggunaan perencanaan dan kekuasaan negara dengan komitmen yang lebih besar pada Darwinisme sosial daripada ekonomi neoklasik. Sosialisme dalam dunia ketiga hanya disamakan dengan perencanaan yang mengandung konotasi suatu komitmen kepada nasionalisasi.

Dari paparan tersebut di atas tampak bahwa Chapra melakukan kritik tajam kepada negara Kapitalisme kaya, sosialis, serta Ekonomi Pembangunan yang telah menggunakan strategi didasarkan pada pandangan dunia (*worldview*) pencerahan yang sekuler sehingga tidak mampu merealisasikan secara simultan sasaran efisiensi dan pemerataan. Sistem ekonomi konvensional telah gagal dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat manusia. Di samping itu secara umum ekonomi konvensional telah gagal karena anatemanya terhadap penilaian (*value judgement*) dan penekanan yang berlebihan pada maksimalisasi kekayaan dan pemuasan serta pemenuhan kebutuhan demi kepentingan individual.³⁵

Revolusi ilmiah dalam ekonomi konvensional tidak komplis sehingga menyebabkan tidak adanya mata rantai yang tegas antara mikro-ekonomi dan makro-ekonomi sehingga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan para ahli ekonomi. Justru dalam kenyataannya seakan-akan terjadi pertentangan antara makro-ekonomi dan mikro-ekonomi. Analisis mikro-ekonomi didasarkan pada kebebasan individu yang berlebihan dan memberi perhatian lebih kepada efisiensi dengan *pareto* tanpa memperhatikan realisasi tujuan-tujuan makro-ekonomi yang didasarkan kepada *worldview* Islam.

Para ekonom konvensional secara umum menganggap bahwa persaingan akan membantu menggerakkan kepentingan diri sendiri dan pada gilirannya memenuhi kepentingan sosial. Padahal beberapa persoalan tidak dapat dijawab oleh sistem ekonomi konvensional, seperti persoalan maksimalisasi kekayaan dan pemuasan keinginan adalah hal yang benar-benar diperlukan untuk mengoptimalkan kesejahteraan umat manusia. Persoalan lain berupa kedamaian mental dan kebahagiaan, solidaritas sosial dan keluarga, pengasuhan bagi anak-anak, pemenuhan kebutuhan pokok bagi semua individu dalam masyarakat, dan distribusi kekayaan yang adil.

3.3 KRITIK TERHADAP ILMU EKONOMI KONVESIONAL

Menurut teori konvensional, ekonomi hanya menjelaskan bagaimana memuaskan semua tuntutan dari setiap orang dan kelompok masyarakat jika sumber daya yang tersedia sangat terbatas. Muncul pertanyaan tentang tuntutan apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana memenuhinya. Jawabannya adalah dengan menggunakan cara khusus agar masyarakat bisa mencapai visinya. Visi ini terkait dengan cita-cita atau harapan masa depannya. Visi ini berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, peradaban satu dengan peradaban lainnya.

Salah satu bentuk perbedaan misi tersebut adalah tentang kesejahteraan (*well-being*). Menurut ekonomi konvensional, kesejahteraan adalah pencapaian yang bersifat materialis dan hedonis. Ekonomi konvensional hanya berusaha memenuhi tujuan individu untuk memperoleh keuntungan individu (*self-interest*). Tujuan hidup manusia hanya untuk memaksimalkan kekayaan dan konsumsi. Padahal, kalau ekonomi berbicara tentang kesejahteraan manusia dalam pengertian yang komprehensif, maka sudah semestinya cakupannya tidak boleh hanya terbatas pada variabel ekonomi saja. Perlu memperhatikan variabel-variabel lain seperti moral, psikologi, sosial, politik, demografi dan sejarah.³⁶

Teori-teori ekonomi konvensional telah mendapat banyak kritikan, seperti Sismondi (1773-1842), Carlyle (1795-1881), dan Kenneth Boulding (1910-1993).³⁷ Paul Ormerod,³⁸ mengatakan bahwa teori ekonomi konvensional telah mati. Kritik lain muncul dari kalangan ahli konvensional yang memahami konteks budaya Asia. Di antara tokohnya adalah Gunnar Myrdal (Swedia),³⁹ Hla Myint (Burma/Myanmar),⁴⁰ Amartya Sen (India),⁴¹ dan Amitai Etzioni.⁴² Di samping itu muncul pemikir Indonesia yang mengkritik, baik secara konseptual teoritis maupun idealita praktis. Di antaranya adalah Sukadji Ranuwihardjo,⁴³ Roekmono Markam,⁴⁴ Mubyarto,⁴⁵ Ace Partadiredja,⁴⁶ dan Sri-Edi Swasono.⁴⁷

Secara umum mereka menilai bahwa ilmu ekonomi konvensional hanya membawa dampak negatif bagi perekonomian dalam sebuah bangsa. Di samping itu mereka sepakat bahwa dalam upaya menanggulangi krisis paradigmatis ilmu ekonomi konvensional, perlu menciptakan bangunan paradigma ilmu ekonomi baru yang lebih manusiawi dan berkeadilan

melalui pendekatan yang bersifat interdisipliner dan holistik. Pendekatan ini mengintegrasikan antara kebutuhan material dengan kebutuhan spiritual manusia, interaksi antar manusia, serta interaksi manusia dengan alam semesta.

Dalam ilmu ekonomi, kritik tersebut melahirkan mazhab-mazhab baru,⁴⁸ antara lain *Grant Economics* (ilmu ekonomi hibah), *Humanistic Economics* (ilmu ekonomi humanistik), *Social Economics* dan *Institutional Economics*. Lahirnya empat madzhab tersebut didasarkan pada kenyataan adanya kelemahan ekonomi konvensional serta memandang penting adanya paradigma baru sebagai bentuk refleksi kesadaran adanya kelemahan ilmu ekonomi konvensional. Mazhab ini secara tegas menolak metode dan *worldview* ilmu ekonomi konvensional.

Grant economics berpendapat bahwa perilaku altruistik tidak harus dianggap sebagai suatu penyimpangan dari rasionalitas, sehingga menyamakan perilaku rasional dengan perilaku yang didasarkan pada kepentingan individu tidaklah realistis. Oleh karena itu jika teori ekonomi berfungsi untuk menghasilkan prediksi yang dapat diandalkan mengenai peristiwa masa yang akan datang, maka asumsi perilaku rasional dalam kerangka gabungan *altruisme* dan *self-interest* akan dapat menghasilkan prediksi yang lebih bermakna.

Adapun *ilmu ekonomi humanistik* didesain untuk mendorong kesejahteraan manusia dengan mengakui dan mengintegrasikan nilai-nilai dasar kemanusiaan. Mazhab ini tidak mendasarkan pemahannya pada psikologi *utilitarianisme* kuno yang menekankan keinginan dan kekayaan, akan tetapi melihat psikologi humanistik yang menekankan pemenuhan kebutuhan dan pembangunan manusia untuk bergerak maju. Karenanya mazhab ini menyertakan seluruh kebutuhan manusia, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, sosial, maupun moral.

Sedangkan *ilmu ekonomi sosial* memiliki komitmen pada keniscayaan netralitas nilai sehingga tidak mampu mengevaluasi kebijakan-kebijakan dan rekomendasi untuk pilihan publik. Komitmen kepada keniscayaan netralitas nilai sebagai gagasan sakral saintis Pencerahan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dicapai karena penelitian ilmiah selalu didasarkan pada asumsi-asumsi ilmiah yang secara tegas melibatkan penilaian. Ada-

pun ilmu ekonomi institusional beranggapan bahwa perilaku manusia dipengaruhi sejumlah lembaga yang selalu berkaitan dengan sosial, ekonomi, politik, dan agama. Mazhab ini membawa janji besar akan mengubah institusi dan menjelaskan kerjasama dan koordinasi dengan memusatkan pada *self-interest* dan kompetisi. Dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat diwujudkan karena *utilitarianisme* dan teori kontrak sosial tidak dapat menyediakan nilai-nilai yang dapat diterima semua pihak.

Dalam perkembangan selanjutnya, empat mazhab ekonomi alternatif sebagaimana disebutkan di atas ternyata tidak dapat sepenuhnya diterima oleh ekonom Muslim karena mazhab ini menghadapi problem perbedaan standar nilai. Amartya Sen, misalnya, meskipun sebagai salah satu pendukung aliran pemikiran ekonomi kritis *Social Economics*, mengatakan bahwa menjauhkan ilmu ekonomi dan etika telah memelaratkan kesejahteraan dan juga melemahkan landasan keterkaitan yang erat antara *deskriptif* dan *prediktif* ilmu ekonomi.⁴⁹

Lebih lanjut, Sen menjelaskan bahwa sebagai ilmu moral, ilmu ekonomi secara imperatif harus mengenalkan tentang keadilan, peduli dengan persamaan dan pemerataan, mengedepankan kemanusiaan, serta mengemban nilai-nilai agama. Secara etikal juga harus mengenal dan menghormati kepentingan-kepentingan bersama, seperti *societal welfare*, *public needs*, *public interests*, *solidarity*, menghormati kepentingan individu seperti kebebasan (*liberty*), kebahagiaan (*happiness*), bahkan *the pursuit of happiness*, kejujuran, *compassion*, *goodness*, *altruism* dan semacamnya.⁵⁰ Oleh karena ilmu ekonomi seharusnya dikembangkan lebih produktif dengan memberikan perhatian secara eksplisit terhadap pertimbangan etis yang dapat membentuk tingkah laku dan penilaian.

Ilmu ekonomi konvensional memang memiliki peran dalam membangun kemajuan, terutama setelah Perang Dunia II. Namun demikian ilmu ekonomi konvensional telah gagal dengan dua alasan. *Pertama*, ketidakmampuannya untuk mengajukan mekanisme yang tepat bagi filterisasi, motivasi, dan restrukturisasi. *Kedua*, ketidakmampuan masyarakat menerapkan mekanisme secara efektif. Pilar paradigma ilmu ekonomi konvensional tersusun dalam tiga konsep penting, yaitu manusia ekonomi rasional, positivisme dan hukum Say.

Konsep rasionalitas dalam ekonomi sesungguhnya merupakan sesuatu wajar karena setiap orang mempunyai kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya melalui kekayaan material, yakni dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi dirinya. Konsep rasionalitas dalam ekonomi sering memunculkan istilah *rational economic man*, yang dalam ekonomi konvensional menyamakan rasionalitas tersebut dengan *serving of self-interest through the maximization of wealth and want satisfaction*. Terkait dengan kendali *self-interest* hanya didasarkan pada *the moral equivalent of the force of gravity in nature*.⁵¹

Terkait dengan makna rasionalitas dalam ekonomi, para ekonom sering mencari kejelasan ungkapan umum dalam ilmu ekonomi bahwa 'keputusan yang diambil oleh pelaku ekonomi harus rasional'. Ungkapan tersebut mengarah pada substansi bahwa pelaku ekonomi akan membuat keputusan dengan akal sehat atas dorongan kepentingan pribadinya untuk menyejahterakan dirinya. Terkait dengan perilaku individu, Chapra menyatakan bahwa ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa perilaku individu adalah rasional. Bagi Chapra, hal tersebut sangat wajar. Namun demikian bagi Chapra,⁵² konsep rasional dalam ilmu ekonomi konvensional dapat diterima jika dapat mendorong terwujudnya tujuan-tujuan yang diinginkan masyarakat. Hal yang terpenting adalah adanya keharusan memasukkan kesejahteraan orang lain sehingga berimplikasi pada keterbatasan perilaku individu.

Sementara terkait dengan positivisme, ia termasuk bagian integral dari paradigma ilmu ekonomi sehingga diterima secara umum sejak abad ke-17, sekalipun terjadi revolusi neoklasikal dan Keynesian. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya pengabaian peran nilai moral sebagai alat untuk memfilter dalam alokasi dan distribusi sumber daya serta memperkokoh *optimalitas Pareto*. Dengan demikian ilmu ekonomi konvensional tidak dapat menganalisa dampak nilai-nilai sosial dan institusi pada alokasi dan distribusi.

Sedangkan terkait dengan hukum Say, Chapra mengungkapkan bahwa hukum Say sebagai produk hukum sekunder dari penerapan hukum fisika Newton dalam ilmu ekonomi menolak jika nilai sosial yang disepakati dilarang berperan dalam filterisasi, motivasi, dan restrukturisasi.⁵³ Hukum Say berpendapat bahwa ekonomi akan berjalan jika dibiarkan sehingga

produksi akan menciptakan permintaannya dan tidak terjadi kelebihan produksi. Hal ini menyebabkan konsep *laissez faire* tidak memperbolehkan negara melakukan intervensi dalam operasi pasar. Logika hukum Say dan konsep *laissez faire* banyak memiliki kelemahan seperti konsensus Keynesian, karena ekonomi pasar tidak dapat bertahan dalam kondisi kesempatan kerja penuh dan kemakmuran secara konstan.

Bagaimanapun juga ilmu ekonomi konvensional yang mendominasi kajian ilmu ekonomi kontemporer masih dianggap belum mampu memecahkan persoalan kebutuhan ekonomi manusia. Teori-teori ekonomi yang telah ada belum mampu mewujudkan ekonomi global yang berkeadilan dan berkeadaban. Sebaliknya teori-teorinya telah mendorong dikotomi antara kepentingan individu, masyarakat dan negara dan hubungan antar negara. Selain itu teori ekonomi konvensional belum terbukti mampu menyelesaikan masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, bahkan tidak mampu menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara di dunia, terutama antara negara maju dengan negara berkembang dan terbelakang. Bahkan yang terjadi adalah terabaikannya pelestarian sumber-sumber daya alam.⁵⁴

Di sisi yang lain ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan tidak memasukkan faktor Tuhan di dalamnya menjadikannya sebagai bidang ilmu yang bebas nilai (*positivistik*). Padahal dari diskursus intelektual mengenai motif perilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional, telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki peran dalam perilaku ekonomi manusia. Adanya kelemahan-kelemahan teori ekonomi konvensional tersebut maka ilmu ekonomi konvensional telah berakhir dan sebagai solusinya adalah perlu dibangun teori ekonomi Islam.⁵⁵

-
- 1 Mubyarto, "Beberapa Ciri dan Landasan Pikiran Sistem Ekonomi Pancasila", dalam Edi Swasono (ed.), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, (Jakarta: UI Press, 1998), hlm. 145.
 - 2 M. Dawam Rahardjo, "Ekonomi-Politik Transisi ke Demokrasi Indonesia" dalam, *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. II, No. 1 Januari-April 2001, hlm. 18.
 - 3 Istilah Negara Kesejahteraan merupakan penerjemahan yang paling banyak digunakan sebagai arti dari istilah *welfare state*. Secara etimologis, *welfare state* yang terdiri dari dua suku kata yaitu *welfare* dan *state*, di mana *welfare* dapat dimaknai dengan kesejahteraan, sedangkan *state* berarti negara atau suatu *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Baca dalam Ibnu Mas'ud, *Kamus Pintar Populer*, (Yogyakarta: Ananda, 1991), hlm. 275.

- 4 Dengan demikian Spicker mendefinisikan Negara Kesejahteraan sebagai sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya. Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, (London: Prentice Hall, t.th.), hlm 82.
- 5 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge*, (Herndon, USA: IIIT, 1995).
- 6 *Ibid.*, hlm. 115-130.
- 7 Lihat penjelasan tentang hal ini dalam Yoshihara Kunio, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*, terj. A. Setiawan Abadi (Jakarta: LP3ES, 1990).
- 8 Chapra memandang *welfare state* yang dimaksud sesuai Islam adalah hubungan antara ekonomi dan politik dengan koridor dan aturan-aturan secara Islam mengenai kehidupan dan fungsi-fungsi negara Islam dalam melaksanakan fungsi-fungsi dasar dan batas-batas finansial untuk kesejahteraan umat. Baca dalam M. Umer Chapra, "The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy" dalam Mahamoud A. Gulaid dan Mohamed Aden Abdullah (Ed.), *Readings Public Finance in Islam*, (Saudi Arabia: Islamic Research and Training Institute, 1415 H/1995 M), hlm. 71.
- 9 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic ...*, hlm. 148.
- 10 *Ibid.*, hlm. 133-134.
- 11 M. Umer Chapra, *The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*, (Leicester, UK: The Islamic Foundation, 1979).
- 12 Richard M. Titmuss, *Commitment to Welfare*, (London: George Allen and Unwin, 1976), hlm. 124 sebagaimana dikutip M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 114.
- 13 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 114.
- 14 Francis Fukuyama, *The End of Order*, (London: The Social Market Foundation, 1997).
- 15 M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, (UK: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 46.
- 16 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 123.
- 17 *Ibid.*, hlm. 124.
- 18 *Ibid.*, hlm. 116.
- 19 *Ibid.*, hlm. 115.
- 20 *Ibid.*, hlm. 117.
- 21 Philip Bassett, "Britain's Trade Unions: At War with a Wasting Disease", dalam *Financial Times*, 28 Agustus 1986. Lihat M. Umer Chapra *Islam and the Economic...*, hlm. 118.
- 22 Philip Bassett, "Unions: Declining Force: Increasing Power", dalam *The Economist*, 14 Februari 1987, hlm. 35.; Philip Bassett, "Japan: All Together Now", dalam *The Economist*, 30 September 1989, hlm. 67. Lihat juga dalam M. Umer Chapra *Islam and the Economic...*, hlm. 118.
- 23 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 117-199, dari sumber asli James O'Connor, *The Fuscak Crisis of the State* (t.p.: tnp., 1973), hlm. 183, dan John K. Galbaith, *The Industrial State* (t.p.: t.p., 1972), hlm. 288.
- 24 John Burton, *Why No Cuts: An Inquiry into Fiscal Anarchy of Uncontrolled Government Expenditure* (t.p.: t.p., 1985), hlm. 86 sebagaimana dalam M. Umer Chapra *Islam and the Economic...*, hlm. 121.
- 25 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 123-124.
- 26 *Ibid.*, hlm. 126.
- 27 *Ibid.*, hlm. 126.
- 28 *Ibid.*, hlm. 128-129.
- 29 M. Umer Chapra, *Islam and the Economic...*, hlm. 130.
- 30 M. Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 373-374.
- 31 M. Umer Chapra, *Islam and Economic...*, hlm. 21-22.

- 32 *Ibid.*, hlm. 147-149.
- 33 *Ibid.*, hlm. 172.
- 34 *Ibid.*, hlm. 174.
- 35 M. Umer Chapra, *What is Islamic Economics?...*, hlm. 33.
- 36 *Ibid.*, hlm. 23.
- 37 P3EI UII dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 35-36.
- 38 Paul Ormerod, *The Death of Economics* (London: Faber and Faber, 1994).
- 39 Salah satu karyanya adalah Gunnar Myrdal, "Institutional Economics", dalam *Journal of Economic Issues*, XIII (4), 771-783, Desember 1978.
- 40 Salah satu tulisan Hla Mynt "Economic Theory and The Underdeveloped Countries", dalam *Journal of Political Economic*, LXXXIII (5): 477-491, Oktober 1965.
- 41 Salah satu karya Amartya Sen, *On Etics and Economics* (Oxford: Basil Blackwell, 1991).
- 42 Salah satu karyanya Amitai Etzioni, *The Moral Dimension: Toward a New Economics* (New York: The Free Press, 1989).
- 43 Sukadji Ranuwihardjo, "Teori Model dan Masalah Pembangunan Ekonomi", Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di UGM, 20 Agustus 1973, Yogyakarta.
- 44 Roekmono Markam, "Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robbins", Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 September 1978, Yogyakarta.
- 45 Mubyarto, "Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan", Pidato Pengukuhan Guru Besar di UGM, 19 Mei 1979, Yogyakarta.
- 46 Ace Partadiredja, "Ekonomika Etik", Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 23 Mei 1981, Yogyakarta.
- 47 Sri-Edi Swasono, *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, (Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa, 2005), lihat juga dalam, *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisme dan Pasar Bebas*, (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005).
- 48 M. Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 47-49.
- 49 Amartya Sen, *On Etics and Economics*, sebagaimana dikutip Sri-Edi Swasono dalam *Ekspose Ekonomika: Mewaspadai Globalisasi dan Pasar Bebas* (Yogyakarta: PUSTEP-UGM, 2005). Lihat juga, P3EI UII dan BI, *Ekonomi Islam...*, hlm. 37.
- 50 Amartya Sen, *On Etics and...*, hlm. 9.
- 51 Milton L. Myers, *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self-Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith*, (Chicago: University of Chicago Press, 1983), hlm. 4. Lihat dalam M. Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 22.
- 52 Umer Chapra, *The Future of Economics...*, hlm. 21.
- 53 *Ibid.*, hlm. 25-28.
- 54 Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: P3EI, 2004), hlm. 6. Asumsi-asumsi tersebut selama ini telah menjadi paradigma pembangunan yang berujung pada lahirnya ketidakadilan dalam masyarakat.
- 55 Umar Vadillo, *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*, (Granada: Madinah Press, 1991).



DAFTAR PUSTAKA

Syeid Muhammad Naquib al-Attas, (1978), *The Dewesternization of Knowledge Chapter 4 dalam Islam and Secularism*, Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia.

_____, (1998), *The Educational Philosophy and Practice of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, (ISTAC IIIT and Civilization

A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 175-199.

A. Yacoob, (1986) "Islamic Banking and Economic Development", Dissertation, Univeristy of Maryland,

Abdul Sami' al-Mis}ri, (2006), *Muqa>wimat al-Iqtisjad al-Islami>*, terj. Dimyaudin Djuwaini, Yogyakarta: Pustaka.

Abdullah Zaky al-Kaff, (2002), *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, terj., Bandung: Pustaka Setia

Ace Partadiredja, *Ekonomika Etik*, Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar pada Fakultas Ekonomi UGM, 23 Mei 1981, Yogyakarta.

Adam Kuper dan Jessica Kuper, (2000), *Ensiklopedi ilmu-ilmu Sosial*, terj., Jakarta: Grafindo Persada.

Adam Smith, (1937), *An Inquiry into the Nature and the Causes of the Wealth of Nations*, New York: The Modern Library.

_____, "The Theory of Moral Sentiments", dalam, www.blackmask.com

Ahmad Erani Yustika, (2013), *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori dan Kebijakan*, Jakarta: Penerbit Erlangga

Ahmad Faruq, dkk., (2004), *Riba and Islamic Banking, dalam Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, University of New Orleans

Ahmad Muhammad al-Ashhshal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, (1980), *An-Nidzam al-Iqtisadi fi al-Islami: Mabadiuhu wa Ahda>fuhu*, Kairo: Maktabah at-Tijariyah al-Kubra.

Al-Faruqi and Ziauddin Sardar: "Islamization of Knowledge or the Social Construction of New Discipline?", dalam *MAAS Journal of Islamic Studies*, vol. 5 No. 2, 1989 / 1410 H, hlm. 79-98.

Ali Sakti, (2007) *Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern*, Jakarta,: Paradigma & Aqsa Publishing

al-Maqrizi, (1967), *al-Nuqu>d al-Isla>miyyah*, ed. Muhammad al-Sayyid 'Ali Bahr al-'Ulum, Qum: Intisyarat al-Syarif al-Radhi

Amartya Sen, (1991), *On Etics and Economics*, Oxford: Basil Blackwell

Amitai Etzioni, (1989), *The Moral Dimension: Toward a New Economics*, New York: The Free Press.

Arif Hoetoro,(2007), *Ekonomi Islam: Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, Malang: BPFE Unibraw.

Asaf A.A. Fayzee, (1963), *A Modern Approach to Islam*, London: Asia Publishing House.

Bernard Crick, (2001), *Sosialisme*, Surabaya: Pustaka Promothea.

Deliarnov, (2015), *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers

Eko Supriyadi,(2003), *Sosialisme Islam: Pemikiran Ali Syariati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Firtz Machlup,(1978), *Methodology of Economics and Other Social Sciences*, New York: Academic Press.
- Francis Fukuyama,(1992), *The End of History and the Last Man*, New York: Avon Books.
- George Soule, (1994), *Pemikiran Para Pakar Ekonomi Terkemuka*, terj. T. Gilarso, Yogyakarta: Kanisius.
- Gunnar Myrdal, "*Institutional Economics*", dalam *Journal of Economic Issues*, XIII (4), 771-783, Desember 1978.
- Harun Nasution, (1986), *Akal dan Wahyu dalam Islam*, Jakarta: UI Press.
- Hassan Hanafi, (1967), *Religious Dialogue and Revolution*, Kairo: Anglo Egytion Bookshop.
- Ibnu Mas'ud, (1991), *Kamus Pintar Popular*, Yogyakarta: Ananda.
- Irene Bjorklund, Lundstrom Lisbeth, (2004) "*Islamic Banking: An Alternatif System*", Paper, Kristian Stad University.
- Irham Fahmi, (2013), *Ekonomi Politik: Teori dan Realita*, Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Ismail Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge: the Problem, Principles and the Workplan*, (Herndon: IIIT, 1982).
- Jamal Khwaja,(1977), *Quest for Islam*, New Delhi: Alied Piblisher Private Limited.
- John Burton, (1985) *Why No Cuts: An Inquiry into Fiscal Anarchy of Uncontrolled Government Expenditure*.
- John Rawls, (1971), *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachussetts: Harvard University Press.
- Kuntowijoyo, (2007), *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Lincoln Arsyad, (2010), *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

- Louay Safi, (1996), *The Foundation of Knowledge: A Comparative Study in Islamic and Western Methods of Inquiry*, International Islamic University and IIIT.
- M. Fahmi, (2005), *Islam Transendental: Menelusuri Jejak-jejak Pemikiran Kuntowijoyo*, Yogyakarta: Pilar Religia.
- M. Nejjatullah Siddiqi, (1986), *Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature*, terj. A.M Saefudin, Jakarta: LIPPM.
- M. Teresa Lunati, (1997), *Ethical Issues in Economics: From Altruism to Cooperation to Equity*, London: Mac Millan Press.
- M. Umer Chapra, (1979), *The Islamic Welfare State and Its Role in The Economy*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- _____, (1991), "The Need For A New Economic System", dalam *Review of Islamic Economics*, (Journal of the Islamic Economic Association, Vol. 1, No.1.
- _____, (1995), *Islam and the Economic Challenge*, Herndon, USA: IIIT.
- _____, (2000), *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, UK: The Islamic Foundation.
- _____, (2005), "Islamic Economics: What It Is and How It Developed", EH.Net Encyclopedia, edited by Robert Whaples. October 14, 2005. URL <http://eh.net/encyclopedia/article/chapra.islamic>.
- _____, (1985), *Towards a Just Monetary System*, Leicester, UK: The Islamic Foundation.
- _____, (2009), *The Islamic Vision of Development in the Light of the Maqâsid Al-Sharî'ah*,
- _____, (1996), *What is Islamic Economics?*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute Islamic Development Bank.
- M.A. Mannan, (1983), "Islamic Economics as a Social Science: Some Methodology Issues", dalam *J. Res. Islamic Economics*, vol. 1 no. 1, hlm. 41-50.

- _____, (1986), *Islamic Economics: Theory and Practice*, Cambridge: The Islamic Academy).
- _____, (1993), *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, terj. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ma'bid Jarhi, (1994), *Islamic Banking and Finance: Philosophical Underpinnings*, dalam Seminar Proceeding, no. 47, IRTI.
- Masudul Alam Choudhury, (1998), *Studies in Islamic Economic Social Sciences*, London: Mc Millan Press Ltd.
- Masyhudi Muqorobin, (2001), *Beberapa Persoalan Metodologis dalam Ilmu Ekonomi*, dalam Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol. 2, No. 2.
- _____, (2001), *Methodology of Economics: Secular Versus Islam*, dalam Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan, Vol. 2, No. 1, April.
- MC Henry & Wilson, Rodey (eds.), (2004), *The Politics of Islamic Finance*, Edinburgh University Press Ltd.
- Milton L. Myers, 1983, *The Soul of Modern Economic Man: Ideas of Self-Interest, Thomas Hobbes to Adam Smith*, Chicago: University of Chicago Press
- Mohammad Aslam Haneef, (1997), *Islam, the Islamic Worldview, and Islamic Economics*, Malaysia: IIUM.
- Mohammed Ariff, (1989), "Economics and the Ethics in Islam", dalam *Readings in the Concepts and Methodology of Islamic Economics*, (eds.) Aidit Ghazali and Syed Omar, Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- Monzer Kahf, (1979), *The Islamic Economy: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*, t.tp.: Plainfield In Muslim Studies Association of U.S. and Canada.
- Monzer Kahf, dkk., (1998), *Islamic Banking and Development an Alternative Banking Concept, a Collective Presentation*, IRTI.
- Mubyarto, (1979), *Gagasan dan Metode Berpikir Tokoh-tokoh Besar Ekonomi dan Penerapannya Bagi Kemajuan Kemanusiaan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar di UGM, 19 Mei 1979, Yogyakarta.

- Muhammad Abdul Mun'im Ghafar, (1985), *al-Iqtisad al-Islami>: al-Iqtisad al-Juz'i*, Jilid 3, Irak: Dar al-Bayan.
- Muhammad Ariff, (1978), "The Islamization of Knowledge and Some Methodological Issues in Paradigm Building: The General Case of Social Sciences with a Special Focus on Economics", dalam *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 4, i.
- Muhammad Baqir ash-Shadr, (2008), *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, terj. Yudi, cet. ke-1, Jakarta: Zahra.
-
- _____, (1987), *Iqtisaduna>*, Beirut: Dar al Ma'arif.
- Muhammad Ihsan Khan, (1952), *World Problem and Muslim Economics*, Karachi: al-Qur'an Printing & Publishing Cooperative Association.
- Munawar Ismail, dkk.,(2014), *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Murasa Sarkaniputra, (2004), *Adil dan Ihsan dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: P3EI
- Mustafa Edwin Nasution, (2007), *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- N. Gregory Mankiw, (2009), *Principles of Economics: Pengantar Ekonomi Mikro*, Jakarta: Salemba Empat.
- Norman Furniss dan Timothy Tilton,(1997), *The Case of Welfare State: From Social Security to Social Equality*, Bloomington, Indiana: International Union Press.
- P.A. Samuelson, (1985), *Ekonomi*, terj., Bandung: Erlangga.
- P3EI UII dan Bank Indonesia, (2012), *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press.
- Paul Ormerod,(1994), *The Death of Economics*, London: Faber and Faber.
- Paul Spicker, *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall.
- Philip Bassett, (1986), *Britain's Trade Unions: At War with a Wasting Disease*, dalam *Financial Times*, 28 Agustus.

- Qomaruddin Khan, (1973), *The Methodology of Islamic Research*, Karachi: Institute of Islamic Studies.
- Richard M. Titmuss, (1976), *Commitment to Welfare*, London: George Allen and Unwin.
- Roekmono Markam,(1978), *Menuju ke Definisi Ekonomi Post Robbins*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi UGM, 19 September 1978, Yogyakarta.
- S.M. Hasanuzzaman,(1984), *Definition of Islamic Economics*, dalam Journal of Research in Islamic Economics.
- Sayyid Tahir, Aidit Ghazali, Syed Omar Syed Agil, (1992) *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, Malaysia: Longmann Malaysia.
- Sofyan S. Harahap, (2006), *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti.
- Sonhadji, (1995), *Doktrin Ekonomi Islam, Jilid 1 s.d 4*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Sri Edi Swasono, (1998), *Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi*, Jakarta: UI Press
- _____, (2005), *Ekspose Ekonomika: Mewaspadaai Globalisme dan Pasar Bebas*, Yogyakarta: PUSTEP-UGM
- _____, (2005), *Indonesia dan Doktrin Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Perkumpulan Pra Karsa.
- Sukadji Ranuwihardjo,(1973), *Teori Model dan Masalah Pembangunan Ekonomi*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Ekonomi di UGM, 20 Agustus 1973, Yogyakarta.
- Syed Nawab Haider Naqvi, (1994), *Islam, Economics and Society*, London and New York: Kegan Paul International.
- Syeid Husein al-Attas, (1969), *The Method of Studying Islam*, artikel dalam SEDAR, Journal dari Muslim Society, University of Singapore, seri 2, 1969.
- Taqyudin an-Nabhani, (2002), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.

- Timur Kuran, (1986), *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*, dalam *International Journal of Middle East Studies*, USA.
- Ugi Suharto, (2002), *Dinar Sebagai Asas Penguatan Sistem Keuangan Islam di Malaysia*, makalah disampaikan dalam Seminar Keuangan Islam yang diselenggarakan oleh Departemen Syari'ah dan Pengurusan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, pada 18 Juni 2002.
- _____, (2005), *Fondasi Epistemology untuk Disiplin Ekonomi Islam: Satu Kajian Awal*, dalam Makalah Disampaikan dalam Workshop Pondasi Epistemologi untuk Ilmu Ekonomi, di UMY, Yogyakarta, 11 April 2005.
- Umar Vadillo, (1991), *The End of Economics: An Islamic Critique of Economics*, Granada: Madinah Press.
- Veithzal Rivai, dkk., (2007), *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja grafindo Persada.
- Zuber Hasan, (1998), "Islamization of Knowledge in Economics: Issues and Agenda", dalam *Journal of Economics and Management*, Vol. 6, No 2, 1998.